

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ZINA
(STUDI KOMPERATIF ANTARA PENDAPAT SYAFI'I DAN
AHMAD BIN HAMBAL)**

SKRIPSI S1

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Menyelesaikan Study dan
Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam**



OLEH :

**ETTI HUSNA
10623003775**

JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji masalah perbandingan pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengenai pembagian harta warisan anak zina yang belum menikah dan berkedudukan sebagai pewaris serta tidak memiliki ahli waris *ashabah*. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengenai pembagian harta warisan anak zina, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengenai pembagian harta warisan anak zina dan untuk mengetahui bagaimana analisa pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengenai pembagian harta warisan anak zina.

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu kitab dari kedua mazhab, bahan hukum sekunder yaitu kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedi dan beberapa buku lain yang menunjang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, kemudian mengadakan telaah buku dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis. Data-data yang telah dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan teknik konten analisis.

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, deduktif, induktif, dan metode komperatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: menurut Syafi'i, dalam pembagian harta warisan anak zina ibunya mendapat warisan sebagaimana terdapat dalam Kitabullah, begitu juga dengan saudara seibunya, sedangkan sisa harta warisan diberikan kepada kaum muslimin melalui *baitul mal*. Menurut Ahmad Bin Hambal, sisa harta warisan anak zina dikembalikan (*diraddkan*) kepada ahli waris *ashabul furud* anak zina.

Persamaan pendapat Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal yaitu mengenai hubungan nasab dan hubungan kewarisan anak zina, persamaan antara kewarisan anak zina dan anak *li'an*, serta bagian yang menjadi hak bagi masing-masing ahli waris *ashabul furud*. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai kedudukan umat Islam dan *baitul mal* dalam kewarisan yang berkaitan dengan sebab-sebab mewarisi, sisa harta warisan anak zina yang tidak mempunyai *ashabah*, penggunaan *radd* dan bagian yang diterima oleh ahli waris (penambahan bagian bagi *ashabul furud*).

Menurut analisa penulis, dari kedua pendapat yang dipegang oleh Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, pendapat yang dipegang oleh Ahmad bin Hambal yang seharusnya kita ambil, yaitu sisa harta anak zina tersebut dibagikan kepada ahli waris yang ada (*ashabul furud*), tidak diserahkan kepada *baitul mal*. Karena *baitul mal* hanya berhak mengambil harta warisan orang yang memang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, selain itu hubungan antara anak zina dengan kaum muslimin lebih lemah dibandingkan dengan hubungan anak zina dengan kaum kerabatnya. Maka sudah seharusnya sisa harta warisan anak zina tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang ada (*ashabul furud*).

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II BIOGRAFI SYAFI'I DAN AHMAD BIN HAMBAL	
A. Syafi'i	
1. Riwayat Hidup Syafi'i	14
2. Pendidikan dan Karya Syafi'i	16
3. Murid-murid Syafi'i	19
4. Metode Istimbath Hukum Syafi'i	20
B. Ahmad bin Hambal	
1. Riwayat Hidup Ahmad bin Hambal	24
2. Pendidikan dan Karya Ahmad bin Hambal	26

3. Murid-murid Ahmad bin Hambal	30
4. Metode Istimbanth Hukum Ahmad bin Hambal	31
C. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat	32
BAB III KEWARISAN ANAK ZINA	
A. Pengertian Anak Zina	38
B. Dasar Hukum Kewarisan Anak Zina	41
C. Kedudukan dan Hubungan Nasab Anak Zina	46
BAB IV PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ZINA	
A. Pembagian Harta Warisan Anak Zina Menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hambal	53
B. Perbandingan Pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal Mengenai Pembagian Harta Warisan Anak Zina	68
C. Analisis	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melaksanakan syari'at Islam merupakan keharusan bagi setiap manusia yang mengakui dirinya seorang muslim. Syari'at Islam telah mengatur seluruh bagian kehidupan manusia, baik itu ibadah dengan Allah maupun muamalah dengan sesama manusia. Begitu juga dengan masalah pernikahan yang dapat menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Sebuah pernikahan merupakan kunci untuk memperoleh keturunan yang diakui oleh agama maupun negara. Begitu pentingnya pernikahan, sehingga sah atau tidaknya sebuah pernikahan dapat berpengaruh terhadap status anak yang dilahirkan dari pernikahan itu. Pernikahan yang sah menurut hukum di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Bagi umat Islam berlaku hukum Islam.

Jika terjadi hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang keduanya tidak ada ikatan pernikahan, maka apabila perempuan tersebut kemudian hamil dan melahirkan anak dari hasil

¹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12, Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 1, Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tentang Hak Azasi Manusia*, (Bandung: Fermana, 2007), cet. ke-1, h. 218.

perzinaannya tersebut, maka anak yang ia lahirkan adalah anak tidak sah. Di dalam hukum Islam, anak tidak sah ini disebut dengan anak zina.²

Anak zina sebagaimana manusia pada umumnya adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan tentu saja dia akan melalui tahap-tahap kehidupan selayaknya manusia. Dia akan tumbuh dewasa, bermuamalah, bersosial dengan manusia lainnya dan akhirnya akan meninggal dunia. Apabila anak zina tersebut mati dengan meninggalkan harta serta kaum kerabatnya, maka harta peninggalannya akan dibagi-bagikan kepada keluarganya yang berhak menerima harta tersebut. Jika anak zina yang meninggal itu adalah muslim, maka berlaku hukum kewarisan Islam atas harta yang ditinggalkannya.³

Hukum kewarisan Islam merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing⁴.

Ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Allah yang terdapat dalam al-Qur'an serta penjelasan yang telah diberikan oleh Nabi

² Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi, *Fiqhul Mawarits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cet. ke-1, h. 282.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet. ke-2, h. 6.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, th), h. 101.

Muhammad SAW. Dalam istilah bahasa arab disebut *faraidh*. Ilmu *faraidh* ini mempelajari tentang siapa yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian masing-masing, bagaimana cara penghitungannya⁵ serta kapan waktu untuk pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan⁶.

Kewarisan di dalam agama Islam sudah diatur sedemikian rupa dan dijelaskan oleh al-Qur'an dan sunnah. Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai kewarisan yaitu surat an-Nisa', ayat 7 sampai 14, ayat 33, ayat 176 dan surat al- Anfal ayat 75. Demikian juga hadits Nabi, salah satu hadits Nabi yang berbicara masalah kewarisan adalah:

ابن عباس رضي الله عنه عن النبي وسلم

: الحقوا الفرائض هـ فما بقي فهو لأولى ذكر

(رواه البخاري ومسلم)⁷

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, dari Nabi SAW, ia berkata: Berikanlah *faraidh* (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas secara *zahir* menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memberikan dan membagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya⁸. Apabila harta tersebut

⁵ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawarits*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke-3, h. 132.

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 331.

⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Qahirah: Dar Ibnu al-Hisyam, 2004), cet. ke-1, h. 785.

⁸ M. Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Imam al-Bukhari*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, A. Ikhwani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), jilid 3, cet. ke-1, h. 752.

bersisa, maka hendaknya sisa itu diberikan kepada keluarga laki-laki yang terdekat hubungannya dengan si pewaris yaitu para *ashabah*⁹.

Hal penting yang harus diperhatikan dari hadits di atas adalah perintah membagikan harta peninggalan sang mayat kepada yang berhak, yaitu ahli warisnya sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh al-Qur'an. Itu berarti, sebuah kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan oleh mayat untuk membagikan harta peninggalannya kepada yang berhak setelah dibayar hutang dan dilaksanakan wasiatnya.¹⁰

Seorang anak sah mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tua yang menyebabkan ia lahir, kemudian anak tersebut akan memperoleh warisan dari kedua orang tuanya apabila mereka meninggal dunia. Demikian pula sebaliknya, kedua orang tuanya juga akan mendapatkan warisan dari anak sah tersebut bila ia meninggal dunia. Hubungan nasab ini adalah salah satu hubungan yang dapat menyebabkan saling mewarisi¹¹.

Hal di atas berbeda dengan keadaan anak zina. Seorang anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya, ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam salah satu hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

⁹ *Ashabah* adalah orang-orang yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari *ashabul furudh* atau mendapatkan seluruh harta peninggalan bila ternyata tidak ada *ashabul furudh* seorangpun. Lihat Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), cet. ke-3, h. 117

¹⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 277

¹¹ Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah; Dasar Pemikiran Hak Milik Atas Harta Peninggalan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-1, h. 18.

الملاعنين الذي يرويه : و كانت

حاملًا و كان ابنها ينسب الى امه فجرت السنة انه يرثها و ترث

فرض (رواه البخارى ومسلم)¹²

Artinya: Dalam hadits suami istri yang bermula'annah yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'd itu, sahal berkata : Bahwa perempuan tersebut sedang hamil, sedang anak dibangsakan kepada ibunya. Maka menurut sunnah (cara) yang berlaku, bahwa anak tersebut menjadi ahli waris dari ibunya dan ibunya menjadi ahli waris dari anaknya menurut apa yang telah ditetapkan Allah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadits tersebut dapat diketahui secara *zahir* bahwasanya tidak adanya hubungan nasab antara seorang laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak zina tersebut menyebabkan tidak adanya hubungan kewarisan antara keduanya. Sehingga anak zina tersebut tidak dapat waris dan mewarisi selain dengan ibu yang melahirkannya dan atau dengan keluarga dari pihak ibunya¹³.

Mazhab yang empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) sepakat bahwa anak zina hanya memiliki hak waris-mewaris dengan ibunya, dan tidak dengan ayahnya. Namun mazhab Imamiyah berpendapat bahwa anak zina tidak mempunyai hak waris-mewarisi dengan ayah dan ibunya, karena faktor penyebab keduanya adalah sama yaitu perzinaan.¹⁴

¹² Al-Bukhari, *op. cit.*, h. 641. Redaksi hadits lihat Alu Mubarak dan Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al-Authar*, penerjemah: Ari Hamzah, Fachrudin, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid 3, cet. ke-1, h. 353.

¹³ Alu Mubarak dan Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *loc. cit.*

¹⁴ Muhammad Jawad al-Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, penerjemah: Masykur, A.B, dkk, (Jakarta: Lantera, 2005), cet. ke-3, h. 578.

Dalam perkara kewarisan, seorang manusia mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu manusia tersebut terletak di posisi sebagai ahli waris, kemungkinan yang kedua yaitu ia terletak di posisi sebagai pewaris. Begitu juga halnya dengan anak zina, anak tersebut bisa menjadi ahli waris dan menjadi pewaris. Jika ia sebagai ahli waris, maka ia adalah ahli waris ibu atau keluarga dari pihak ibunya. Sebaliknya, jika anak zina tersebut sebagai pewaris, maka ahli waris anak zina itu adalah ibunya.

Mengenai permasalahan anak zina sebagai pewaris, para ulama berbeda pendapat dalam masalah pembagian harta warisan anak zina tersebut. Ada dua pendapat dalam hal ini, pendapat pertama yang berasal Zaid bin Tsabit dan kemudian pendapat ini dipegang oleh beberapa imam mazhab, yaitu Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah. Pendapat ini mengatakan bahwa harta anak zina tersebut dibagi sebagaimana harta anak sah atau bukan anak zina.

Menurut pendapat yang digunakan oleh Imam Syafi'i, ahli waris anak zina tersebut adalah sebagaimana ahli waris anak sah. Artinya, ibu anak zina tersebut dapat mewarisi sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an. Kemudian apabila anak zina tersebut meninggalkan saudara-saudara se-ibu, maka saudara-saudaranya tersebut dapat memperoleh bagian mereka. Namun apabila anak zina tersebut tidak mempunyai saudara-saudara se-ibu, maka sisa hartanya diserahkan kepada kaum muslimin melalui *baitul mal*.¹⁵ *Baitul mal*

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1983), Juz 4, cet. ke-2, h. 86.

artinya rumah harta atau kas negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan Islam untuk mengurus masalah keuangan negara.¹⁶

Pendapat kedua yang berasal dari Ali, Umar dan Ibnu Mas'ud dan dianut oleh beberapa ulama dan imam mazhab, seperti al-Hasan, Ibnu Sirrin, ats-Tsauri dan imam Ahmad bin Hambal. Mereka berpendapat bahwa yang menjadi *ashabah*nya adalah *ashabah* dari ibunya¹⁷. Sehingga apabila harta anak zina tersebut bersisa maka harta itu tidak diserahkan kepada *baitul mal*, tetapi dikembalikan (*diraddkan*¹⁸) kepada ahli waris yang ada (*ashabul furud*¹⁹) dan keluarga dari pihak ibu (*ashabah* ibu).

Pertanyaan besar yang akan timbul jika permasalahan mengenai pembagian harta warisan anak zina tersebut tidak dituntaskan, apakah sisa harta anak zina tersebut diberikan kepada kaum muslimin melalui *baitul mal* sebagaimana pendapat yang dipegang oleh Syafi'i atau sisa harta tersebut dibagikan kembali kepada ahli waris yang ada, yaitu *ashabul furud* (ibu, saudara-saudari se-ibu) dan keluarga dari pihak ibunya (*ashabah* ibu).

Menanggapi perbedaan pendapat dari kedua kelompok tersebut, perlu kiranya dibahas dan dikaji lebih jauh mengenai pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh anak zina, sehingga jelas bagian untuk para ahli waris dari

¹⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 1*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), cet. ke-9, h. 223.

¹⁷ Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 224.

¹⁸ *Radd* yaitu memalingkan atau menyerahkan sisa harta warisan dari bagian-bagian yang tertentu (*furud*) kepada para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu (*ashabul furud*) ketika tidak ada *ashabah*. lihat Saleh al-Fuazan, *Al-Mulakhhasul Fiqhi*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema insani Press, 2005), cet. ke-1, h. 623

¹⁹ *Ashabul furudh* adalah orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu jumlahnya. Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 116.

anak zina. Karena jika bagian harta warisan untuk orang-orang yang menjadi ahli waris dari anak zina tersebut tidak jelas, sehingga ada dua pendapat yang digunakan di dalam masyarakat, maka akan terjadi kekacauan. Hal tersebut mungkin saja terjadi seandainya ada dua orang yang memegang pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya berada dalam satu masalah pembagian harta warisan seorang anak zina.

Untuk menghindari hal tersebut, penulis berusaha untuk meneliti dan mencari pendapat yang paling baik dan sesuai dari keduanya yang diharapkan nantinya bisa diaplikasikan oleh masyarakat muslim demi kemaslahatan bersama. Penelitian mengenai pembagian harta warisan anak zina tersebut penulis tulis dengan judul **“Pembagian Harta Warisan Anak Zina (Studi Komperatif Antara Pendapat Syafi’i dan Ahmad bin Hambal)”**.

B. Batasan Masalah

Oleh karena masalah kewarisan anak zina ini berkaitan dengan banyak hal, diantaranya anak zina sebagai ahli waris dan anak zina sebagai pewaris. Maka sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya membahas masalah pembagian harta warisan anak zina yang belum menikah yang berkedudukan sebagai pewaris tanpa menghubungkannya dengan persoalan lain guna mengkaji perbandingan pendapat yang dipegang oleh Syafi’i dan Ahmad bin Hambal mengenai pembagian harta warisan anak zina, serta dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing pendapat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengenai pembagian harta warisan anak zina?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengenai pembagian harta warisan anak zina?
3. Bagaimana analisa pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengenai pembagian harta warisan anak zina?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengenai pembagian harta warisan anak zina.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengenai pembagian harta warisan anak zina.
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisa pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengenai pembagian harta warisan anak zina.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu untuk mencapai ridha Allah SWT, serta untuk menambah ilmu, memperluas wawasan dan cakrawala berfikir terutama bagi penulis di bidang kajian fikih dan ilmu hukum.

- b. Sebagai sebuah karya ilmiah, laporan penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dari penulis kepada almamater UIN dan kiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum, terutama fiqih mawaris.
- c. Sebagai salah satu bacaan yang dapat memotifasi para ulama untuk mengkaji lebih lanjut masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.
- d. Sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu pembagian harta warisan anak zina menurut pendapat Syafi'i dan Amad bin Hambal.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu kitab karangan Syafi'i "*al-Umm*", dan "*al-Mughni*", karya Ibnu Qudhamah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu kitab karangan Ibnu Rusdy "*Bidayat al-Mujtahid*", Fachtur Rahman "*Ilmu Waris*", Amir Syarifuddin "*Hukum Kewarisan Islam*" dan lain-lain.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu *Kamus Bahasa Indonesia*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Ensiklopedi Islam*, dan beberapa buku lain yang menunjang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

4. Metode Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu teknik analisa isi dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat, latar belakang budaya atau situasi penulis.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengenai pembagian harta warisan anak zina apa adanya.
- b. Metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum, kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- d. Metode komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang paling dianggap kuat dari masing-masing pendapat.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, di dalam bab ini dijelaskan biografi Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, riwayat hidup, pendidikan, karya serta murid-muridnya dan mengenai metode istimbath hukum masing-masing imam mazhab, serta penyebab terjadinya perbedaan pendapat.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan tentang kewarisan anak zina, pengertian anak zina, dasar hukum kewarisan anak zina, serta kedudukan dan hubungan nasab anak zina.

Bab keempat, pada bab ini dipaparkan pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengenai pembagian harta anak zina, perbandingan pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengenai pembagian harta warisan anak zina, serta analisa dari kedua pendapat tersebut.

Bab kelima. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya tulis ilmiah yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

BIOGRAFI SYAFI'I DAN AHMAD BIN HANBAL

A. Syafi'i

1. Riwayat Hidup Syafi'i

Nama lengkap Syafi'i adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd al-Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib.¹ Syafi'i biasa dipanggil dengan panggilan Abu Abdillah. Beliau berasal dari suku Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakeknya yang ke sembilan, Abd al-Manaf. Abd al-Manaf adalah kakek keempat Nabi Muhammad SAW.²

Jika di lihat dari silsilah ibunya, maka Fatimah binti Abdullah bin - Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dapat diketahui bahwa dari pihak ibunya, silsilah Syafi'i juga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui Abi Thalib yang menjadi paman Nabi SAW dan kakek ke lima Syafi'i. Beberapa penulis mengatakan bahwa Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa Syafi'i dilahirkan di Asqalan, tidak jauh dari Gaza. Ada juga yang mengatakan

¹ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'alam as-Salaf*, penerjemah: Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. ke-2, h. 355.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. ke-1, h. 121.

bahwa Syafi'i dilahirkan di Yaman. Ia dilahirkan pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi.³

Syafi'i menjadi yatim setelah ayahnya meninggal dalam usia muda. Saat berusia dua tahun, Syafi'i dibawa ibunya pindah ke Mekkah, kampung halaman ibunya dengan tujuan agar Syafi'i tidak terlantar.⁴ Sumber lain menyebutkan bahwa Syafi'i sebelum pindah ke Mekkah, ia dibawa ibunya ke Hijaz, di mana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman. Kemudian ketika mencapai umur sepuluh tahun, ia dibawa pindah ke Mekkah.⁵

Selama hidupnya, Syafi'i sering melakukan perjalanan dan pindah dari satu kota ke kota lain. Dari Mekkah dia pindah ke Madinah, kemudian ia merantau ke Yaman dan pada tahun 195 H ia pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama dua tahun kemudian kembali lagi ke Mekkah. Pada tahun 198 H ia pergi ke Baghdad dan pindah ke Mesir pada tahun 199 H setelah beberapa bulan tinggal di Baghdad. Ia menetap di Mesir hingga wafat pada tanggal 29 Rajab tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Syafi'i menghembuskan nafas terakhirnya pada malam Jum'at setelah Isya' dan dimakamkan pada hari Jum'at setelah Ashar.⁶ Ia dimakamkan di

³ Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, penerjemah: Basri Iba Asghari dan Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. ke-1, h. 159.

⁴ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 356.

⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003), cet. ke-3, h. 101.

⁶ Syaikh Ahmad Farid., *op. cit.*, h. 383.

perkuburan Bani Abdul Hakam⁷, di sebuah tempat yang bernama Mishru al-Qadimah, di Qal'ah.⁸

2. Pendidikan dan Karya Syafi'i

Pada masa kecilnya, Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas dan selalu giat dalam belajar. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya dalam menghafal dan memahami pelajaran yang diberikan lebih baik dari teman-temannya, sehingga menjelang usia sembilan tahun, Syafi'i kecil telah menghafal 30 juz al-Qur'an. Pada saat itu ia berguru kepada Ismail bin Qusrhanthein.⁹

Setelah belajar al-Qur'an dan menghafalnya, ia mempelajari bahasa dan sastra Arab seperti syair, puisi dan sajak Arab klasik¹⁰. Untuk menguasai bahasa itu, dia pergi ke daerah tempat tinggal Bani Huzail. Hal itu dilakukannya karena kaum ini terkenal dengan bahasa Arabnya yang baik. Di sana ia juga belajar mengenai sejarah dan adat istiadat orang-orang Arab.¹¹

Ia belajar hadits dan fiqh dari ulama-ulama di Mekkah, salah satu ulama yang terkenal pada masa itu adalah Imam Muslim Khalid al-Zanzi (wafat pada tahun 180 H/796 M). Selain pada Muslim, dia juga berguru

⁷ Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Semarang: Darul Ikhya, 1980), cet. ke-1, h. 436.

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 123.

⁹ Muhammad Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. ke-1, h. 70.

¹⁰ *Ibid.*, h. 71.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1977), jilid V, h. 1680

pada Sofyan bin Uyainah (wafat pada tahun 198H/813 M).¹² Ia terus belajar dari ulama tersebut hingga ia dibolehkan oleh gurunya itu untuk mengeluarkan fatwa sendiri.¹³

Pada usia lima belas tahun, setelah Syafi'i menghafal isi kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, ia pergi ke Madinah dan belajar di sana. Pada umur dua puluh tahun, ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H/ 796 M. Karena kecerdasannya, Syafi'i dipercayai sebagai asisten Imam Malik untuk mendiktekan *al-Muwaththa'* kepada murid-muridnya dan setelah Imam Malik wafat, beliau telah meraih reputasi sebagai seorang *fuqaha* yang masyhur di Hika dan berbagai tempat lainnya.¹⁴

Ketika Mush'ab bin Abdillah al-Quraysi, seorang gubernur Yaman memberikan Syafi'i pekerjaan maka berangkatlah ia ke Yaman dan terus memperdalam ilmunya sambil bekerja sebagai pegawai pemerintah. Dari Yaman ia pergi ke Baghdad dan mendalami fiqh aliran *ra'yu* terutama dari seorang sahabat dan murid Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hadan al-Syaibani.¹⁵

Dalam rangka pendalaman ilmunya, Syafi'i terus mengadakan perjalanan ke berbagai negeri Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya

¹² Abdurrahman I. Doi, *op. cit.*, h. 160.

¹³ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), cet. ke-6, h. 103.

¹⁴ Abdur Rahman I. Doi, *loc. cit.*

¹⁵ *Ibid.*

guru-guru beliau di berbagai kota, dengan latar belakang keilmuan yang tidak diragukan lagi, bahkan ada beberapa gurunya yang memegang paham *Mu'tazilah* dan *Syi'ah*. Di kota Mekkah ia pernah belajar dengan Muslim bin Khalid al-Zinzi, Sufyan bin Uyainah, Said bin Salim, Daud bin Abdurrahman al-Atthar, Abdul Hamid bin Abdul Aziz. Di kota Madinah, dengan Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad al-Daruridi, Ibrahim bin Abi Yahya al-Asami (salah seorang pemikir *Mu'tazilah*), Muhammad bin Abi Said, Abdullah bin Nafi dan Syihab bin Abi Dzuaib. Di Yaman dengan Matraf bin Mazim, Hisyam bin Yusuf, Umar bin Abi Salamah dan Yahya bin Hasa. Di Iraq dengan Waki' bin al-Jarrah, Abu Husamah Hamad bin Usamah al-Kufayan, Muhammad bin Hasan al-Syaibani, Isma'il bin Attaih al-Basyri, dan Abdul Wahab bin Abdul Majid.¹⁶

Pada tahun 186 Syafi'i kembali ke Mekkah membentuk semacam pengajian di mesjid *al-Haram*. Selain itu, Syafi'i juga mengajar di Baghdad dari tahun 195 sampai 197 Hijriah dan akhirnya di Mesir sampai beliau wafat (819M/204 H). Salah satu karya Syafi'i yang terkenal adalah kitab *al-Risalah fi al-Ushu al-Fiqh* yang lebih dikenal dengan nama kitab *al-Risalah*. Kitab ini adalah kitab yang pertama dikarang oleh Syafi'i pada saat usianya masih muda. Kitab ini ditulis atas permintaan Abdul-Rahman bin al-Mahdy di Mekkah, ia mengirim surat dan meminta kepada Syafi'i untuk menuliskan sebuah kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-

¹⁶ Ahmad asy-Syurbasi, *al-Aimmat al-Arba'ah*, penerjemah: Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 149.

Qur'an, perkara yang ada di dalam al-Qur'an, *nasikh* dan *mansukh* serta hadits Nabi Muhammad SAW, juga dasar-dasar *ijma'*. Kitab ini disalin oleh murid-muridnya setelah ditulis kemudian baru dikirim ke Mekkah, itulah sebab kenapa kitab ini dinamai *al-Risalah*. Kitab ini ditulis dengan menggunakan gaya bahasa yang menarik namun mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh.¹⁷

Selain itu, ada kitab *al-Umm* yang juga tidak kalah terkenalnya dari kitab *al-Risalah*. Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam *al-Risalah*.¹⁸ Al-Baihaqi mengatakan bahwa karya yang telah dihasilkan oleh Syafi'i berjumlah sekitar seratus empat puluhan kitab. Hal senada juga dikatakan oleh para ulama-ulama lainnya, bahwa kitab yang telah dikarang oleh Syafi'i tidak kurang dari tujuh puluh kitab.¹⁹

3. Murid-murid Syafi'i

Murid-murid Syafi'i tersebar di banyak tempat, di Mekkah misalnya ada Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musan bin Abi Jarud. Di Baghdad muridnya antara lain al-Hasan as-Sabah, al-Za'farani, al-Husain bin Ali al-Kurabisyi, Abu Tsaur al-Kulbi, Ahmad bin Muhammad al-Asy'ari al-Basyri. Di Mesir, Harmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Isma'il bin Yahya al-Mizani, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Hakam, Ibnu Hanbal al-

¹⁷ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 375-377

¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 134.

¹⁹ Syaikh Ahmad Farid, *loc. cit.*

Buthi, al-Muzani, al-Rabi' al-Muradi. Di Iraq, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam al-Luqawi.²⁰

4. Metode Istimbath Hukum Syafi'i

Pegangan Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*²¹. Syafi'i menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurutnya Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadits *ahad* tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadits *mutawatir*²². Di samping itu karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.²³

Jalan yang dipakai oleh Syafi'i dalam berijtihad sebagaimana yang dijelaskan oleh Thaha Jabir Fayad al-'Ulwani, yaitu sebagai berikut:

يكن فقياس عليهما تصل الحديث عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم وص به فهو المنتهى

والحديث ظاهره اشبه

²⁰ Ahmad asy-Syurbasi, *op. cit.*, h. 151-152.

²¹ *Ijma'* adalah kesepakatan dari para mujtahid umat islam pada satu masa tentang hukum syara'. *Qiyas* adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok (asal) kepada cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan nash) karena adanya pertautan '*illat* keduanya. Hudhari Biek, *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah, th), h. 111, 137

²² Hadits *ahad* menurut istilah Syafi'i adalah setiap hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh seorang, dua orang atau sedikit lebih banyak dan belum mencapai syarat hadits *masyhur*. Sedangkan hadits *mutawatir* adalah hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin sepakat untuk berbohong, dengan perawi yang sama banyaknya sehingga *sanadnya* bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), cet. ke-6, h. 154-156

²³ Huzaemah Tahido Yaggo, *op. cit.*, h. 128.

منها ظاهره هابه الاحاديث فاصحها ها وليس
 المسيب ولا يقاس اصل على اصل ولا يقال
 على اي صل لم وكيف وانما يقال للفرع لما فاذا صح قياسه على الاصل
 صح وقامت به الحجة

Artinya: “Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur’an dan sunnah. Apabila tidak ada dalam al-Qur’an dan sunnah, maka dengan mengqiyaskan kepada al-Qur’an dan sunnah, dan apabila *sanad* hadits bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan *shahih sanadnya*, maka cukuplah baginya untuk dijadikan dalil. *Ijma’* sebagai dalil adalah lebih kuat dari *khabar ahad* dan hadits menurut zhahirnya. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang *zhahirlah* yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih *shahihlah* yang lebih utama. Hadits *munqathi*,²⁴ tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa.

²⁴ Hadits *munqathi*’ atau hadits *mursal* adalah hadits yang *sanadnya* tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 159.

Apabila sah meng*qiyaskan* cabang kepada pokok, maka *qiyas* itu sah dan dapat dijadikan *hujjah*”²⁵

Dari sini dapat kita ketahui, bahwa jalan pertama yang ditempuhnya adalah dengan mencari dalil dari al-Qur'an, kemudian sunnah (hadits *mutawatir*), kemudian ketika tidak ditemukan, maka dia akan menggunakan *khavar ahad*. Dalam menggunakan hadits *ahad*, Syafi'i mensyaratkan beberapa hal terhadap perawi yang meriwayatkan hadits tersebut, yaitu²⁶:

- a. Terpercaya,
- b. Berakal dan memahami apa yang diriwayatkannya,
- c. Kuat ingatannya,
- d. Ia benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya,
- e. Ia tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits tersebut.

Jika dari hadits *ahad* masih tidak didapatkan dalil, maka Syafi'i akan menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an dan Sunnah. Dan jika masih tidak ditemukan dalil, maka Syafi'i mencoba untuk menemukan *mukhashshih*, setelah itu berturut-turut ia akan mencari apa yang pernah

²⁵ Ja'ih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1, h. 31- 32.

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 129.

dilakukan Nabi dan bagaimana pendapat para ulama sahabat atau *ijma'* dari mereka jika tidak menemukan *mukhashshihnya*.²⁷

Menurut Syafi'i, *ijma'* yang paling kuat adalah *ijma'* para sahabat dan ia mengatakan secara tegas bahwa *ijma'* tersebut adalah *ijma'* yang berstatus dalil hukum. Mengenai *ijma' sharih* dan *sukuti*, Syafi'i hanya menerima *ijma' sharih*, karena menurutnya dalam *ijma' sukuti* itu belum tentu semua *mujtahid* sepakat.²⁸ *Ijma' sharih* yaitu *ijma'* dimana setiap *mujtahid* menyatakan bahwa mereka menerima pendapat yang disepakati oleh *jumhur fuqaha'* sebagai hujjah. Sedangkan *ijma' sukuti* yaitu suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang *mujtahid*, kemudian pendapat itu telah diketahui oleh para *mujtahid* yang hidup semasa dengan *mujtahid* di atas, akan tetapi tidak ada seorangpun yang mengingkarinya.²⁹

Jika ia juga tidak mendapatkan *ijma'* sahabat, maka ia akan menggunakan *qiyas*. Ia menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'* dalam menetapkan hukum. Menurut Syafi'i, peristiwa apapun yang dihadapi oleh kaum muslimin pasti didapatkan petunjuk tentang hukumnya di dalam al-Qur'an.

Syafi'i adalah *mujtahid* pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidah dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan *mujtahid* sebelumnya, walaupun mereka telah menggunakan *qiyas* dalam berijtihad,

²⁷ *Ibid.*, h. 127-129.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 317-318.

akan tetapi mereka belum membuat rumusan patokan kaidah sebagaimana yang dilakukan oleh Syafi'i.³⁰

B. Ahmad Bin Hanbal

1. Riwayat Hidup Ahmad Bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan. Dari silsilah garis keturunan Ahmad, nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui kakeknya yang bernama Nazzar. Nazzar mempunyai empat orang anak, diantaranya yaitu Mudhar dan Rabi'ah. Dari Mudhar inilah turun silsilah yang sampai kepada nabi Muhammad.³¹

Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal al-Syaibani dan ibunya adalah Shaifiyah Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindun al-Syaibani. Kedua orang tua Ahmad bin Hanbal adalah dari golongan terkemuka kaum Amir. Sebagian pendapat mengatakan bahwa dia dilahirkan di Marwa pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah, sewaktu orang tuanya pergi ke sana dan tinggal untuk sementara waktu.

³⁰ *Ibid.*, h. 130-133.

³¹ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 434.

Kemudian setelah itu dia dibawa ke Baghdad.³² Sedangkan pendapat yang lain menyebutkan bahwa Ahmad dilahirkan di Baghdad.³³ Dikatakan pula bahwasanya kediaman orang tuanya yang sebenarnya adalah di kota Marwin wilayah Khurasan, namun ia dilahirkan di Baghdad ketika orang tuanya pergi ke sana.³⁴

Ayahnya merupakan salah seorang Gubernur Sarkhas, salah satu daerah kekuasaan Bani Umayyah, namun ia sendiri bersimpati pada golongan Abbasiyyin, bahkan ia menjadi juru dakwah mereka yang terkemuka. Daerah Sarkhas merupakan pusat gerakan pembela Abasiyyin hingga runtuhnya Daulah Umayyah. Ada pula yang menyebutkan bahwa ayah Ahmad bin Hambal adalah seorang pejuang yang tinggal di daerah Bashrah Iraq.³⁵

Ayahnya meninggal pada tahun 179 H, pada usia tiga puluh tahun, ketika Ahmad masih kecil. Setelah kematian ayahnya, ia diasuh oleh ibunya. Pada masanya, yang menjadi khalifah adalah al-Mu'tashim Billah. Pada waktu itu khalifah sedang berpihak pada *Mu'tazilah*, hal ini dapat dilihat dari dijadikannya *Mu'tazilah* sebagai mazhab negara, bahkan ajarannya dijadikan alat untuk melakukan *mihnah* (ujian al-Qur'an itu makhluk).³⁶

³² Abdur Rahman I. Doi, *op. cit.*, h. 165

³³ Jaih Mubarak, *op. cit.*, h. 115.

³⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 137.

³⁵ Abdur Rahman I. Doi, *loc. cit.*

³⁶ Jaih Mubarak, *loc. cit.*

Ahmad bin Hanbal adalah ulama hadits dan ulama fiqh yang sudah dikenal masyarakat. Pandangannya berpengaruh di masyarakat. Karena itu, ia pun terkena *mihnah* tentang kemakhlukan al-Qur'an, apakah al-Qur'an itu *makhluk* atau *qadim*. Menurut *Mu'tazilah*, al-Qur'an itu adalah *makhluk*, karena itu dia baru dan tidak *qadim*. Sedangkan menurut aliran di luar *Mu'tazilah*, al-Qur'an itu adalah *qadim* dan bukan *makhluk*. Pada perkembangan selanjutnya, aliran di luar *Mu'tazilah* ini menjadi aliran *Asy'ariyah* dan *Salafiyah*.³⁷

Ketika Ahmad bin Hanbal ditanya mengenai masalah itu, ia tidak menjawab dan akhirnya dia dipenjarakan pada akhir bulan Ramadhan tahun 220 H, dia dikeluarkan dari penjara setelah Mu'tashim meninggal dunia dan digantikan oleh al-Watsiq.³⁸ Ahmad bin Hanbal wafat di Baghdad pada siang hari Jum'at, tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 Hijriah.

2. Pendidikan dan Karya Ahmad Bin Hanbal

Sejak kecil, Ahmad bin Hanbal telah menunjukkan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang. Sejak kecil juga ia telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan, dan kebetulan pada masa itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Pada usia yang masih muda yaitu saat ia masih berumur empat belas tahun³⁹, Ahmad

³⁷ *Ibid.*, h. 116

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Muhammad Bahri Ghzali, *Djumadris, op. cit.*, h. 82.

telah hafal al-Qur'an. Kemudian ia mempelajari hadits, bahasa, sejarah dan lain-lain. Untuk memperdalam ilmunya ia beberapa kali pergi ke Bashrah, di sanalah ia bertemu dengan Syafi'i. Ia juga melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menuntut ilmu, diantaranya Kuffah, Bashrah, Mekkah, Madinah, Yaman dan Syam.⁴⁰

Ahmad bin Hambal banyak menimba ilmu dari *fuqaha'-fuqaha'* besar, bahkan disebutkan bahwa guru Ahmad bin Hambal sebanyak seratus empat orang.⁴¹ Diantara gurunya ialah Abu Yusuf, Umar, Ibn Hunain, Ibn Abbas, dan lain-lain. Dalam bidang fiqh, ia belajar pada Syafi'i dan ia juga belajar fiqh *ahli ra'yu* pada Abu Yusuf. Setelah beberapa lama ia mempelajari fiqh, ia beralih pada kajian-kajian sunnah (hadits) yang pada awalnya dipelajarinya dari Hisyam bin Basyir, seorang tokoh hadits kota Baghdad.

Selama empat tahun ia belajar pada gurunya ini, ia memperoleh pengetahuan hadits yang sangat luas dan ia sangat banyak menulis hadits. Ia memusatkan perhatiannya pada hadits di Baghdad dan kemudian ia mengembara ke berbagai daerah untuk menggali ilmu dan belajar hadits.⁴² Dalam bidang hadits ia banyak meriwayatkan dari Hasyim, Ibrahim, Ibn Sa'ad dan Sufyan bin 'Uyainah.

Kesungguhannya dalam menuntut ilmu tampak dari pengembaraannya itu, tidak hanya sekali ia pergi ke suatu daerah, kadang-

⁴⁰ Jaih Mubarak, *op. cit.*, h. 117.

⁴¹ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 459.

⁴² Mumhammad Bahri Ghazali, Djumadris, *op. cit.*, h. 83-84.

kadang sampai berulang kali, sehingga ia dikenal sebagai imam sunnah pada masanya. Karena kerajinannya dalam mengumpulkan hadits, beliau menjadi seorang alim yang mahir dan paling banyak menghafal hadits-hadits Nabi pada masanya. Ia mempelajari hadits-hadits tersebut sejak ia berusia enam belas tahun dan terus sampai usianya lanjut.⁴³

Ahmad bin Hanbal mencari hadits-hadits Nabi tidak hanya sebentar waktu dan tidak hanya satu negara saja, tetapi dalam waktu yang lama dan pergi ke negeri-negeri yang jauh mencari ulama-ulama terkemuka. Karena kerajinan dan kemahirannya dalam ilmu hadits maka banyak ulama yang menggolongkannya ke dalam ulama ahli hadits dan bukan sebagai seorang *fuqaha*'.

Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukannya sebagai ahli fiqh, seperti Ibnu Jarir al-Thabari, Ibnu Qutaibah dan al-Maqdisi menganggap bahwa beliau adalah *muhaditsin* bukan *fuqaha*'. Karena beliau tidak pernah membukukan fiqhnya dalam satu buku dan tidak pula mendiktekan kepada murid-muridnya sebagaimana yang dilakukan oleh imam mazhab lainnya. Pegangan orang dalam menukilkan fiqhnya adalah kegiatan dari murid-muridnya.⁴⁴

Ahmad bin Hanbal pada dasarnya tidak menulis kitab fiqh secara khusus, karena masalah fiqh yang dikaitkan dengannya sebenarnya berasal dari fatwanya sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang pernah ditanyakan kepadanya. Sedangkan yang menyusun fatwa tersebut menjadi

⁴³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 224.

⁴⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 141.

suatu kitab fiqh adalah pengikutnya dan fiqh Ahmad ini sangat diwarnai oleh hadits.

Ahmad bin Hambal belajar pada Syafi'i di masjid *al-Haram* dan kemudian di Baghdad dalam bidang perumusan dan teknik pengambilan hukum.⁴⁵ Karena belajar pada Syafi'i, maka para pengikut Syafi'i menganggap bahwa Ahmad adalah salah seorang pengikut Syafi'i, walaupun dalam kasus-kasus tertentu ia berijtihad sendiri.

Ahmad sangat tertarik terhadap ketangkasan Syafi'i dalam bidang perumusan fiqh, kaedah-kaedah deduktif dan metode-metode ijtihadnya, hal ini yang banyak mempengaruhi pemikirannya. Di sini tampak bahwasanya Ahmad bin Hanbal juga seorang *fuqaha'*. Kekaguman dan keterkaitannya pada pemikiran Syafi'i adalah suatu bukti bahwa ia memiliki perhatian yang besar terhadap masalah-masalah fiqh. Abu Bakar al-Khilal, salah seorang muridnya yang sangat berjasa telah mengumpulkan dan membukukan fatwa dan perkataan Ahmad bin Hambal menjadi beberapa buku⁴⁶.

Adapun alasan ulama yang menyebutkan bahwa Ahmad bukan seorang *fuqaha'* adalah secara faktual, memang tidak ada buku-buku fiqh karangannya. Alasan lain yang memperkuat pendapat tersebut adalah kebiasaan setiap *muhanditsin* yang juga memahami masalah-masalah fiqh. Memang Ahmad bin Hanbal sangat menonjol dalam bidang hadits, tetapi concernnya terhadap masalah-masalah fiqh juga tidak dapat dinafikan. Hal

⁴⁵ Jaih Mubarak, *op. cit.*, h. 177.

⁴⁶ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 462.

ini dapat difahami dari banyaknya murid-murid beliau yang menuliskan fatwa-fatwa dan pendapatnya hingga disusun suatu akumulasi pemikiran-pemikiran fiqh yang dinisbatkan kepadanya⁴⁷.

Adapun karya-karya yang telah disusun oleh Ahmad bin Hanbal yaitu kitab *Musnad*, kitab ini berisi lebih dari empat puluh ribu hadits Nabi SAW⁴⁸, kitab *at-Tafsir* yang memuat seratus dua puluh ribu hadits, kitab *al-Nasikh wa al-Mansukh*, kitab *al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an*, kitab *Jawabatu al-Qur'an*, kitab *al-Tarikh*, kitab *Manasiku al-Kabir*, kitab *Manasiku al-Shagir*, kitab *Tha'atu al-Rasul*, kitab *al-'Illah*, kitab *al-Shalah*,⁴⁹ kitab *Nafyu at-Tasybih*, kitab *al-Imamah*, kitab *ar-Raddu'an az-Zanadiqah*, kitab *az-Zuhd*, dan kitab *as-Sahabah*.⁵⁰

3. Murid-murid Ahmad Bin Hanbal

Diantara murid-murid Ahmad bin Hanbal yang turut meneruskan dan mengembangkan ajarannya yaitu Shalih bin Ahmad bin Hanbal (wafat 226 H), yaitu anak dari Ahmad bin Hanbal, 'Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (wafat 290 H), Ahmad bin Muhammad bin Hani Abu Bakr al-Atsrami (wafat 261 H), 'Abdul Malik bin 'Abdul Hamid bin Mahran al-Maimanui (wafat 271 H), Ahmad bin Muhammad bin al-Hajaj (Abu Bakar al-Marwadzi, wafat 275 H)⁵¹, Abdul Qasim Al-Baqhwi, Abu Bakar al-

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Hudhari Bik, *op. cit.*, h. 444.

⁴⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 142-145.

⁵⁰ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 461- 462.

⁵¹ Jaih Mubarak, *op. cit.*, h. 118.

Ahramm. Serta beberapa ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Ahmad bin Hanbal adalah Bukhari, Muslim, Ibnu Abi al-Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarimy.⁵²

4. Metode Istimbath Hukum Ahmad Bin Hanbal

Jalan pertama yang akan ditempuh oleh Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum adalah dengan mencari *nash* yang terkait dengan masalah tersebut di dalam al-Qur'an dan sunnah yang *shahih*, namun jika ia tidak menemukannya, maka ia akan menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila yang ditemukan hanya fatwa-fatwa yang diperselisihkan, maka ia akan mengambil fatwa dari sahabat yang menurutnya lebih dekat kepada al-Qur'an dan sunnah.⁵³

Jika ia juga tidak menemukan fatwa sahabat mengenai masalah yang sedang dihadapinya, maka ia akan mencari dan menggunakan hadits *mursal* dan hadits *dha'if*. Mengenai penggunaan kedua hadits tersebut perlu dijelaskan bahwasanya Ahmad bin Hanbal hanya membagi hadits ke dalam dua kelompok, yaitu hadits *shahih* dan hadits *dha'if*. Jalan selanjutnya yang ia tempuh jika ia tidak juga menemukan hadits *dha'if*,

⁵² Abdur Rahman I. Doi, *op. cit.*, h. 166.

⁵³ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. ke-1, h. 275.

maka ia akan menggunakan *qiyas* dan kadang-kadang ia menggunakan *masalah al-mursalah*⁵⁴ dalam menetapkan hukum.⁵⁵

C. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perbedaan pendapat mengenai penetapan masalah hukum telah terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Tetapi perbedaan pendapat itu segera dapat dipertemukan dengan mengembalikannya pada Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat, maka sering timbul di kalangan sahabat perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap masalah tertentu. Misalnya Abu Bakar yang tidak memberikan warisan kepada saudara si mayat, jika mereka mewarisi bersama-sama dengan kakek si mayat, karena kakek dia dijadikan seperti ayah, dimana *nash* menyatakan bahwa ayah meng*hijab*⁵⁶ kewarisan para saudara si mayat. Sedangkan Umar bin Khathab memberikan warisan si mayat kepada para saudara, karena kakek termasuk ke dalam kata-kata “ayah” yang disebutkan dalam *nash*.⁵⁷

Perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi itu tidak banyak jumlahnya, karena masalah yang terjadi pada masa itu tidak sebanyak masalah yang timbul pada generasi selanjutnya. Di samping itu, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat dan *tabi'in* serta ulama *mujtahidin* tidak

⁵⁴ *Maslahah mursalah* adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditompang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 427.

⁵⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 142-143.

⁵⁶ *Hijab* adalah penghalang mempusakai. Lihat Lihat Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), cet. ke-3, h. 439-441.

⁵⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 51.

menyentuh masalah yang tergolong sebagai dasar-dasar agama, termasuk yang telah diketahui dalam agama tanpa perlu dalil dan hal-hal yang telah diijma'kan serta ditunjukkan oleh *nash-nash* yang *qath'i*.⁵⁸ *Nash* yang *qath'i dalalahnya* yaitu adalah *nash* yang tidak memerlukan penjelasan lagi (jelas) dan *nash* itu sudah dapat ditetapkan *taklif*.⁵⁹

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam, di samping disebabkan oleh faktor yang bersifat manusiawi juga disebabkan oleh faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang bertalian dengan agama. Faktor yang bersifat manusiawi yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan diri manusia itu sendiri, seperti metode istimbath seorang *mujtahid*, kondisi lingkungan tempat ia hidup. Sedangkan faktor yang bertalian dengan agama yaitu faktor yang berasal dari *nash-nash* al-Qur'an dan hadits itu sendiri.

Faktor penyebab itu mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Makin lama semakin berkembang sepanjang sejarah hukum Islam, sehingga kadang-kadang menimbulkan pertentangan yang keras, terutama di kalangan orang-orang awam. Namun dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini, masalah *khilafiyah* tidak begitu dipersoalkan lagi, apabila *khilafiyah* tersebut hanya dalam masalah *furu'iyah* yang terjadi karena perbedaan dalam berijtihad.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 169.

Syekh Muhammad al-Madani dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha'*, sebagaimana yang dikutip oleh Huzemah Tahido Yanggo membagi sebab-sebab *ikhtilaf* ke dalam empat macam⁶⁰, yang kesemuanya itu merupakan masalah *ushul* yang berkaitan dengan penggunaan dalil. Sebab-sebab tersebut yaitu:

1. Perbedaan ulama mengenai sumber hukum yang utama, yaitu Al-Qur'an dan sunnah dari segi pemahaman terhadap *nash-nash* yang *zhanny dalalahnya*. *Nash* yang *zhanny dalalahnya* adalah *nash* yang pengertiannya tidak tegas yang masih mungkin untuk ditakwilkan atau mengandung pengertian lain dari arti literalnya.⁶¹

Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Qur'an dan sunnah keduanya berbahasa Arab. Dalam al-Qur'an dan sunnah tersebut terdapat kata-kata yang *musytarak*, yaitu lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang mana arti-arti tersebut dapat dipergunakan secara bergantian sesuai dengan konteks lafaz tersebut, contohnya "*quru*" yang mempunyai arti "*haidh*" (menstruasi) dan "*ath-thurh*" (suci).⁶²

Selain itu, juga terdapat ungkapan yang bersifat '*amm*' yaitu lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertian dalam satu makna yang berlaku. Contohnya lafaz "*ar-rijal*"⁶³.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Penerjemah: Noer Iskandar al-Basany, Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 46.

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 252.

⁶³ *Ibid.*, h. 236.

Lafaz yang bersifat *khas* yaitu lafaz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk *mufrad*, baik pengertian itu menunjukkan pada jenis seperti “*hayawan*”, atau menunjukkan macam seperti “*insan rajul*”, atau menunjuk arti perorangan seperti Ibrahim⁶⁴. Selain itu adapula perbedaan tinjauan dari segi *lughawi* dan *urfi* serta dari segi *mantuq* dan *mafhumnya*. *Dalalah mantuq* adalah dalalah lafaz di tempat pengucapan atas hukum dari kata yang disebut (petunjuk suatu lafaz nash atas ketentuan hukum berdasarkan penuturan nash itu sendiri). *Dalalah mafhum* adalah dalalah lafaz yang bukan tempat ucapan atas ketetapan hukum dari hal yang disebut bagi hukum yang didiamkan atau atas penyangkalan hukum dari padanya (petunjuk suatu lafaz nash baik sifat penetapan maupun peniadaan suatu ketentuan hukum bukan berdasarkan pada apa yang disebutkan, melainkan pada apa yang tidak disebutkan oleh *nash*).⁶⁵

2. Perbedaan mengenai sunnah diantaranya yaitu:

- a. Perbedaan dalam penerimaan hadits. Sahabat Nabi yang menerima dan meriwayatkan hadits tidak sama, karena setiap sahabat memiliki kesempatan yang tidak sama. Sebagian sahabat yang menghadiri majlis Nabi lebih banyak tentu akan lebih banyak mendengar, menerima dan meriwayatkan hadits, begitu juga sebaliknya jika sahabat tersebut sedikit menghadiri majlis Nabi, maka sudah tentu akan sedikit pula ia menerima dan meriwayatkan hadits.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 236-237

⁶⁵ Hudhari Biek, *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah, th), h. 147-148.

- b. Perbedaan dalam menilai periwayatan hadits. Penilaian hadits oleh setiap ulama berbeda-beda, tergantung pada mampu atau tidaknya sebuah hadits memenuhi syarat *sanad* dan *matan* yang mereka tentukan agar dapat diterima sebagai sebuah hadits *shahih*. Bisa saja seorang ulama misalnya, menilai bahwa sebuah hadits itu *shahih*, sedangkan sebagian yang lain menilainya tidak *shahih*.
 - c. Perbedaan mengenai kedudukan sunnah Rasul sesudah dikaitkan dengan *syakhshiyyah* Rasul. Perbedaan ini berawal dari perbedaan dalam memandang kedudukan Nabi Muhammad saat ia berbuat dan berkata. Karena Nabi Muhammad, di samping sebagai seorang Rasul, beliau juga pemimpin negara dan seorang manusia biasa. Sehingga, perkataan dan perbuatannya sebagai seorang manusia biasa akan berbeda kedudukannya jika ia berkata dan berbuat sebagai seorang Rasul.
3. Perbedaan pandangan dan penilaian terhadap *nash-nash* yang memungkinkan dan memberi celah adanya perbedaan penafsiran. Hal ini berkaitan dengan perbedaan pendapat dalam penggunaan kaidah-kaidah *ushuliyah* dan kaidah-kaidah *fiqhiyah*. Kaidah *ushuliyah* adalah suatu hukum *kulliy* yang dapat dijadikan standar hukum bagi *juz'i* yang diambil dari dasar *kulliy* yakni al-Qur'an dan sunnah, sedangkan kaidah *fiqhiyah*

adalah hukum universal (*kulliy*) yang bersesuaian dengan bagiannya dan bisa diketahui hukumnya⁶⁶.

4. Perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan dalam penggunaan dalil selain al-Qur'an dan sunnah, seperti, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*⁶⁷, *masalah mursalah* dan lain-lain.⁶⁸

⁶⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke-3, h. 6, 98.

⁶⁷ *Istihsan* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar (tersembunyi) atau dari ketentuan yang *kulliy* (umum) kepada ketentuan hukum yang sifatnya khusus, karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan yang dimaksud. Lihat Abdul Wahhab Khalaf, *op. cit.*, h. 93

⁶⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 52-62.

BAB III

KEWARISAN ANAK ZINA

A. Pengertian Anak Zina

Kata anak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil.¹ Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan anak adalah keturunan kedua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau *khuntsa*, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis². Sementara itu, di dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia menyebutkan bahwa anak yaitu kelompok manusia muda usia yang batasan umurnya tidak selalu sama di berbagai negara. Di Indonesia, sering dipakai batasan umur anak dari 0 sampai 21 tahun. Dengan demikian, dalam kelompok anak akan termasuk bayi, anak balita dan anak usia sekolah.³

Zina berarti perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan perempuan yang bukan istrinya, atau perbuatan bersenggama seorang perempuan yang terikat

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke-3, h. 41

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), cet. ke-6, h. 112.

³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Nasional Indonesia, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997), cet. ke-1, h. 4

perkawinan dengan laki-laki yang bukan suaminya.⁴ Pengertian lain juga menyebutkan bahwa zina adalah hubungan kelamin di luar nikah, atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan minimal batas penis di luar nikah.⁵

Di dalam Ensiklopedi Islam, disebutkan bahwa zina dengan kata dasar (*masdar*) dari *zana-yazni*, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan pernikahan, ada ikatan pernikahan semu (seperti nikah tanpa wali, nikah *mut'ah*⁶, hubungan beberapa laki-laki terhadap hamba perempuan yang dimiliki secara bersamaan) atau ikatan kepemilikan (tuan atas hamba sahaya).⁷

Di dalam Ensiklopedi Islam Cyril Glasse, zina adalah hubungan seksual di luar nikah. Ia merupakan satu diantara dosa besar dan sebuah kejahatan.⁸ Zina menurut bahasa berarti kekejian dan kesempitan. Kata ini juga disebutkan untuk perbuatan yang tidak sampai pada tahap persetubuhan secara tidak langsung. Zina secara mutlak diartikan dengan menyetubuhi perempuan tanpa melalui akad nikah yang diatur dalam agama.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 1280.

⁵ N. A. Baiquni, dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Indah, 1996), h. 501.

⁶ Nikah *mut'ah* menurut Ibnu Hazm adalah nikah dengan batasan waktu tertentu dan dilarang. Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, penerjemah: Abdul Ghoffar EM, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. ke-1, h. 148

⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 5*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), cet. ke-5, h. 237.

⁸ Ensiklopedi Islam (Ringkas) Cyril Glasse, penerjemah: Ghufroon A. Mas'adi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-3, h. 450.

Zina secara istilah didefinisikan secara berbeda-beda oleh para ahli fiqih yang semuanya masih berdekatan dan istilah yang paling baik menyatakan bahwa zina adalah hubungan intim pada kelamin bagian depan yang bukan miliknya (tidak berhak) atau tidak dalam keadaan *syubhat*.⁹

Pengertian anak zina menurut beberapa ulama:

1. Menurut Fathur Rahman anak zina ialah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut syari'at.¹⁰ Sedang perkawinan yang sah diakui di Indonesia ialah perkawinan yang diakui oleh masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan yang berlaku.
2. Menurut Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan badan di luar nikah yang sah menurut syari'at Islam.¹¹
3. Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, anak zina adalah anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh *syara*'.¹²
4. Menurut Amir Syarifuddin di dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam ia menyebutkan bahwa anak zina adalah anak yang lahir dari

⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-A'immah*, penerjemah: Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, cet. ke-1, h. 35.

¹⁰ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), cet. ke-3, h. 223.

¹¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fii Fiqhi an-Nisaa'*, penerjemah: M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2007), cet. ke- 25, h. 545.

¹² Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi, *Fiqhul Mawarits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cet. ke-1, h. 282.

suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah (kecuali dalam bentuk *syubhat*) meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah, dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.¹³

Dilihat dari pengertian yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Dengan begitu, seorang anak dapat dikatakan anak zina apabila:

1. Anak tersebut dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki. Sehingga apabila seorang perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki, maka anak yang dilahirkannya tidak dapat disebut sebagai anak zina, meskipun anak itu dinasabkan kepada ibunya.
2. Perempuan dan laki-laki yang melakukan hubungan badan tersebut belum menikah atau sudah menikah, tetapi dengan laki-laki atau perempuan lain.

B. Dasar Hukum Kewarisan Anak Zina

Dasar hukum kewarisan anak zina adalah ayat-ayat mawaris yaitu surat an-Nisa', ayat 11 dan 12, serta hadits Nabi SAW:

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet. ke-2, h. 148

يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وان كانت واحدة فلها نصف و لابويه لكل واحد منهما السدوس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابوه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها اودين ابأؤكم و ابنأؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما

Artinya: Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa':11)¹⁴

Secara *zahir*, dapat diketahui bahwa apabila seseorang meninggal dunia dan dia hanya diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga, kemudian apabila dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Sehingga apabila seorang anak zina meninggal dunia dan ia hanya memiliki ibu dan bapak saja, maka ibunya mendapatkan bagian sepertiga dari harta warisan yang ia tinggalkan. Kemudian

¹⁴ Depag RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka al-Kutsar, 2009), h. 78.

jika anak zina tersebut memiliki saudara se-ibu, maka ibunya mendapatkan bagian seperenam dari harta yang ditinggalkannya.

نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلکم
الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها اودين ولهن الربع مما
تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد
وصية توصون بها اودين و ان كان رجل يورث كللة او امرأة وله اخ
واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث من بعد وصية يوصى بها اودين غير مضار وصية من الله و
الله عليم حلیم

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah) dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (QS. An-Nisa':12)¹⁵

Dari ayat di atas, secara *zahir* dapat diketahui bahwa jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari

¹⁵ *Ibid.*, h. 79.

kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam sepertiga itu. Begitu juga dengan anak zina. Jika ia tidak mempunyai anak, namun mempunyai seorang saudara se-ibu baik laki-laki maupun perempuan, maka ia mendapatkan seperenam. Kemudian jika anak zina itu mempunyai saudara se-ibu lebih dari seorang, maka mereka mendapatkan bagian sebesar sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan.

ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقوا

الفرايض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر¹⁶

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, dari Nabi SAW, ia berkata: Berikanlah *faraidh* (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a di atas secara *zahir* menunjukkan perintah untuk memberikan harta warisan kepada yang berhak. Dalil-dalil tersebut di atas, secara umum telah menjelaskan mengenai pembagian harta warisan orang yang meninggal dunia, tanpa membatasi apakah orang yang meninggal dunia itu adalah anak sah atau anak zina. Sedangkan dalil yang mengkhususkan keumuman ayat dan hadits di atas, yaitu hadits Nabi SAW:

الم الذي يرويه : و

و كان ابنها ينسب الى امه فجرت السنة انه يرثها و ترث منه ما فرض

¹⁶ Hadits *shahih*. Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Qahirah: Dar Ibnu al-Hisyam, 2004), cet. ke-1, h. 785.

(رواه البخارى ومسلم)¹⁷

Artinya: Dalam hadits suami istri yang bermula'annah yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'd itu, sahal berkata : Bahwa perempuan tersebut sedang hamil, sedang anak dibangsakan kepada ibunya. Maka menurut sunnah (cara) yang berlaku, bahwa anak tersebut menjadi ahli waris dari ibunya dan ibunya menjadi ahli waris dari anaknya menurut apa yang telah ditetapkan Allah. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas mengkhususkan keumuman dalil-dalil sebelumnya, sehingga meskipun seseorang yang meninggal dunia itu mempunyai bapak, namun jika ia adalah seorang anak zina atau anak *li'an* maka yang berhak mewarisi harta peninggalannya hanya ibunya saja. Hal ini juga dijelaskan di dalam hadits Nabi SAW:

حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن
عن أبيه عن جده
ان النبي صلى الله عليه وسلم : ايما رجل عاهر رة او أمة لولد
ولد زنا لا يرث ولا يورث (رواه الترمذى)¹⁸

Artinya: Qutaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ab menceritakan kepada kami, dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya: sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Siapa saja laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan merdeka atau hamba sahaya, maka anaknya itu adalah anak zina, dia tidak dapat mewarisi dan diwarisi. (HR. Tirmidzi)

Hadits-hadits tersebut merupakan dasar hukum untuk membagikan harta warisan kepada anak zina dan pembagian harta warisannya. Hadits di

¹⁷ Al-Bukhari, *op. cit.*, h. 641. Redaksi lihat Alu Mubarak dan Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al-Authar*, penerjemah: Ari Hamzah, Fachrudin, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, jilid 3, h. 353.

¹⁸ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), juz 4, h. 38.

atas secara *zahir* menunjukkan bahwa anak zina hanya dapat waris dan mewarisi dengan ibu yang melahirkannya dan atau dengan keluarga dari pihak ibunya¹⁹. Anak zina tidak dapat waris dan mewarisi dengan laki-laki yang menyebabkan dia lahir. Baik anak zina tersebut lahir dari perempuan yang merdeka maupun dari seorang budak.²⁰

C. Kedudukan dan Hubungan Nasab Anak Zina

Kedudukan anak menurut hukum Islam, pada prinsipnya hanya mengakui seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dan dianggap sah. Dengan demikian anak yang tidak sah dalam hubungan keluarga kedudukannya tidak sama dengan anak yang sah dan tidak dapat menuntut persamaan hak seperti kedudukan anak yang sah pada laki-laki yang menjadi suami ibunya, sekalipun laki-laki tersebut yang menyebabkan anak tidak sah itu lahir.

Hukum Islam menentukan tenggang waktu sekurang-kurangnya 6 bulan sejak saat pernikahan kedua orang tua sampai lahirnya anak, juga tenggang waktu maksimal harus ada antara putusnya pernikahan atau putusnya *iddah* dengan lahirnya anak. Tenggang waktu tersebut sangat penting untuk menghilangkan keragu-raguan demi kepastian hukum. Adanya tenggang waktu tersebut dapat mempermudah untuk mengetahui sah atau tidaknya anak yang dilahirkan.

¹⁹ Alu Mubarak dan Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *loc. cit.*

²⁰ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, penerjemah: Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid 2, cet. ke-1, h. 639.

Limit waktu minimal 6 bulan ini telah disepakati oleh ulama, mereka beralasan dengan firman Allah dalam surat al-Ahqaf, ayat 15 yang berbunyi :

وصينا بوالديه حملته امه كرها وضعته كرها
حمله فصله شهرا اربعين

ترضه ذريتي اليك المسلمين

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang muslim."²¹

Demikian juga firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 :

وصينا بوالديه حملته امه ه هن فصله في عامين
ان اشكر لى ولولديك الي المصير

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.²²

²¹ Depag RI, *op. cit.*, h. 504.

²² *Ibid.*, h. 412.

Implikasi dari surat al-Ahqaf diatas menunjukkan bahwa saat mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. Sedangkan dalam surat Luqman dijelaskan bahwa menyapihnya selama 2 tahun atau 24 bulan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa waktu minimal untuk mengandung seorang anak adalah 6 bulan, karena sisa dari 30 bulan dikurangi 24 bulan adalah 6 bulan.

Seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, jika anak tersebut dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad nikah, sebab tenggang waktu yang paling pendek yang harus ada antara kelahiran sang anak dengan pernikahan itu adalah enam bulan. Itu berarti jika ada anak yang dilahirkan sebelum usia pernikahan orang tuanya mencapai enam bulan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah.²³

Anak hasil zina tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibu anak tersebut meskipun kita mengetahui bahwa secara hukum *kauni qadari* anak zina tersebut adalah anaknya, yang berarti Allah SWT menakdirkan terciptanya anak zina tersebut sebagai hasil percampuran air mani laki-laki itu dengan wanita yang dizinainya. Akan tetapi secara hukum *syar'i*, anak itu bukan anaknya karena tercipta dengan sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat, yaitu perzinaan.

²³ Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 221.

Berdasarkan hal tersebut di atas, di mana anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan ia lahir, maka seluruh hukum nasab antara keduanya pun tidak berlaku. Adapun hukum nasab yang tidak berlaku antara keduanya yaitu:

1. Antara laki-laki pezina dan anak zinanya, keduanya tidak saling mewarisi.
2. Laki-laki tersebut tidak wajib memberi nafkah kepada anak zinanya.
3. Laki-laki tersebut bukan mahram bagi anak zinanya (jika dia wanita) kecuali apabila laki-laki itu menikah secara sah dengan ibu anak zinanya setelah mereka bertaubat, kemudian keduanya telah melakukan hubungan suami-istri, dan setelah anak itu lahir maka anak itu menjadi mahramnya.
4. Laki-laki tersebut tidak bisa menjadi wali anak itu dalam pernikahan (jika dia wanita). Namun bukan berarti laki-laki tersebut boleh menikahi putri zinanya.

Mengenai hal ini, Said bin Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf serta Urwah bin Zubair, mereka mengatakan bahwa seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, tidak dibolehkan bagi laki-laki itu menikahi anak perempuan hasil dari perzinaannya untuk selamanya. Hal ini juga menjadi pendapat Sufyan ats-Tsauri.²⁴

²⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 396.

Hal senada juga dijadikan disepakati oleh jumruh ulama, mereka berdalil meskipun anak hasil hubungan zina tidak berkonsekuensi keharaman, tapi anak perempuan tersebut masuk dalam keumuman dari kata “anak-anakmu yang perempuan” di dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’, ayat 23:

حرمت عليكم امهتكم وبناتكم و اخواتكم
 و بنت الاخ و بنت الاخت و امهتكم التي ارضعنكم و اخواتكم
 من الرضاعة و امهت نسائكم و ربائكم التي في حجوركم من
 نسائكم التي د خلتم بهن فان لم تكونوا د خلتم بهن فلا جناح
 عليكم و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم و ان تجمعوا بين
 الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.²⁵

Alasan lain perngharaman tersebut adalah bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh menikahi anak susuannya yang disusui

²⁵ Depag RI, *op. cit.*, h. 81.

oleh istrinya dengan air susu yang diproduksi dengan sebab digauli olehnya sehingga hamil dan melahirkan.²⁶ Jika anak susuan saja haram untuk dinikahi, tentu seorang anak zina yang berasal dari air maninya dan merupakan darah dagingnya sendiri lebih pantas untuk dinyatakan haram atasnya.

Para ulama menyatakan bahwa seorang anak zina dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya dan keduanya saling mewarisi. Jadi nasab anak tersebut dari jalur ayah tidak ada. Yang ada hanyalah nasab dari jalur ibunya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwasanya suami istri yang melakukan *li'an* di hadapan hakim karena suaminya menuduh bahwa anak yang dikandung istrinya adalah hasil perzinaan sedangkan istrinya tidak mengaku lalu keduanya dipisahkan oleh hakim, maka anak yang dikandung wanita itu dinasabkan kepada ibunya dan terputus nasabnya dari jalur ayah. Sebagaimana dalam hadits Sahl bin Sa'd As-Sa'idi:

الملاعنين الذى يرويه : و كانت

حاملًا و كان ابنها ينسب الى امه فجرت السنة انه يرثها و ترث

فرض الله (رواه البخارى ومسلم)²⁷

Artinya: Dalam hadits suami istri yang *bermula'anah* yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'd itu, Sahal berkata : Bahwa perempuan tersebut sedang hamil, sedang anak dibangsakan kepada ibunya. Maka menurut sunnah (cara) yang berlaku,

²⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Tudhih Madzahib al-A'immah*, penerjemah: Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-2, h. 116, 122.

²⁷ Al-Bukhari, *loc. cit.* Redaksi lihat Alu Mubarak dan Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *loc. cit.*

bahwa anak tersebut menjadi ahli waris dari ibunya dan ibunya menjadi ahli waris dari anaknya menurut apa yang telah ditetapkan Allah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Jika kedua orang yang berzina tersebut menikah dalam keadaan wanitanya hamil maka pernikahan itu tidak sah. Hanya saja, kalau pernikahan itu dilangsungkan dengan anggapan bahwa hal itu boleh dan sah sebagaimana mazhab sebagian ulama yang berpendapat bahwa boleh bagi seorang laki-laki yang menghamili seorang wanita dengan perzinaan menikahinya untuk menyelamatkan nasab anak dengan syarat keduanya telah bertaubat dari perzinaan dan diketahui dengan pasti bahwa yang menghamilinya adalah laki-laki itu.

Maka dalam hal ini pernikahan itu dikategorikan sebagai nikah *syubhat*. Artinya, pernikahan itu berlangsung dengan anggapan bahwa hal itu boleh menurut syariat, padahal sebenarnya tidak boleh. Ini artinya pernikahan itu tidak mengubah status anak hasil perzinaan tersebut sebagai anak zina, dia tetap dinasabkan kepada ibunya dan tidak sah dinasabkan kepada laki-laki tersebut.

Namun jika pernikahan itu dilangsungkan tanpa maksud untuk dapat mengubah nasab anak zina yang lahir, yang artinya laki-laki yang berzina menikahi perempuan yang di zinainya, maka hal itu adalah boleh menurut kesepakatan para ulama.²⁸

²⁸ *Ensiklopedi Ijma'*, penerjemah; K.H.A. Sahal Machfudz dan K.H. Musthafa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), cet. ke-1, h. 477.

BAB IV

PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ZINA

A. Pembagian Harta Warisan Anak Zina Menurut Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal

1. Syafi'i

Menurut pendapat yang digunakan oleh Syafi'i, yang mana pendapat ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh Zaid bin Tsabit dan para fuqaha' Madinah serta Hanafi dan Malik, bahwa ahli waris anak zina tersebut adalah sebagaimana ahli waris anak sah. Ibu anak zina tersebut dapat mewarisi sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an.¹ Hal ini dapat diketahui dari perkataan Syafi'i di dalam kitab *al-Umm*:

Apabila anak dari perempuan yang *berli'an* dan anak zina meninggal dunia, maka ibunya mendapat warisan sebagaimana terdapat dalam Kitabullah. Saudara se-ibunya juga mendapatkan hak mereka. Kami memperhatikan sisanya, apabila ibunya itu bekas budak, maka sisa warisannya untuk tuan ibunya. Apabila ibunya itu wanita Arab atau tidak mempunyai perwalian, maka sisa warisan itu bagi kaum muslimin.²

Pada masa sahabat, pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh Zaid bin Tsabit. Zaid bin Tsabit adalah salah seorang sahabat yang menghafal dan mengumpulkan al-Qur'an. Bahkan Nabi SAW pernah berkata tentangnya: "Zaid adalah orang yang paling faham tentang

¹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), cet. ke-3, h. 223.

² Abu Abdullah Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1983), cet. ke-2, juz 4. h. 86.

faraidh”³. Pendapat yang sama juga dipegang oleh Malik dan hal tersebut yang diketahuinya dari ulama Madinah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam *al-Muwaththa'*:

حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عروة بن الزبير كان يقول :
 ولد الملائنة و ولد الزنا انه اذا مات ورثته امه حقها في كتاب الله
 عز وجل وإخوته لامه حقوقهم و يرث البقية موالى امه ان كانت
 لالة و ان كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لا مه حقوقهم
 و كان ما بقي للمسلمين⁴

Artinya: Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, ia telah mendapat kabar bahwa 'Urwah bin az-Zubair pernah memberi pernyataan tentang anak yang dilaknat dan anak hasil zina, bahwa jika ia meninggal, maka ibunya mendapatkan bagian warisan yang menjadi haknya yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an. Saudara-saudaranya yang seibu juga memperoleh hak-haknya, dan sisanya diwarisi oleh tuan ibunya jika memang ibunya adalah seorang budak. Namun jika ibunya orang merdeka, maka ia memperoleh haknya dan saudara-saudara seibunya juga memperoleh hak mereka, sedangkan sisanya diperuntukkan bagi kaum muslimin.

Menurut Syafi'i, Zaid bin Tsabit, para *fuqaha'* Madinah serta Hanafi dan Malik, ahli waris anak zina tersebut adalah sebagaimana ahli waris dari anak sah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam hal nasab, anak zina hanya dinasabkan dengan ibunya. Sehingga nasab dari jalur ayah tidak ada. Jika ahli waris dari jalur ayah tidak ada, maka besar kemungkinan bahwa anak zina tersebut tidak memiliki *ashabah*. Sedangkan *ashabah* adalah orang-orang yang berhak menerima sisa dari harta warisan. Jika *ashabah* tidak ada, maka tidak ada pula orang atau

³ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' lil Imam Malik*, penerjemah: Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, h. 614.

⁴ Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet. ke-1, h. 329.

pihak yang dapat dan berhak menerima sisa harta warisan anak zina tersebut.⁵

Menurut pendapat ini, sisa dari harta warisan anak zina yang tidak memiliki *ashabah* tersebut diserahkan kepada umat muslim, melalui badan keuangan negara atau *baitul mal* dengan berdalil pada hadits Nabi SAW:

حدثني عبد السلام بن عتيق الدمشقي :
 إسماعيل بن عياش :
 عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه :
 عليه وسلم يقول :
 له أفك عنيه و ارث ماله (روه أبو داود وغيره)⁶

Artinya: 'Abdussalam bin 'Atiq ad-Damsyiq meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Mubarak meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ismail bin 'Ayyas meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Hujr, dari Sholih bin Yahya bin Miqdam, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata: Aku adalah pewarisnya orang yang tidak mempunyai pewaris, akulah yang akan membebaskan tawanannya (membayar *diyat*) dan mewarisi hartanya. (HR. Abu Daud dan lainnya)

Di dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW bersabda bahwa dia adalah pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris⁷. Namun kata “aku” di sini bukan berarti Rasulullah SAW sendiri, tetapi umat Islam secara keseluruhan. Sehingga harta yang diserahkan kepada beliau (Nabi Muhammad) tidak digunakan untuk beliau, tetapi digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum. Karena umat Islam juga

⁵ Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 117.

⁶ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), juz 3, cet. ke-1, h. 49.

⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahhih Sunan Abu Daud*, penerjemah: Abdul Mufid Ihsan, M. Sobar Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, cet. ke-2, h. 346.

berkewajiban membayar *diyat* orang Islam yang melakukan tindak pembunuhan dan tidak mampu membayar *diyat* kepada keluarga korban serta tidak mempunyai keluarga sama sekali. Hal ini sama dengan kewajiban *ashabah* yang membayarkan *diyat* anggota keluarganya yang berada dalam keadaan yang sama.⁸

Dari pendapat yang dipegang oleh Syafi'i di atas, dapat dipahami beberapa hal mengenai pembagian harta warisan anak zina, yaitu:

1. Dalam masalah pembagian harta warisan anak zina, Syafi'i menyamakan antara anak zina dan anak *li'an*.⁹
2. Apabila ibu anak zina mewarisi sendirian, maka ia memperoleh bagian 1/3 dari harta warisan dan sisanya diserahkan ke *baitul mal*.
3. Apabila ibu anak zina mewarisi bersama-sama dengan seorang saudara atau saudari se-ibu, maka ibunya mendapat bagian 1/3, sedangkan saudara atau saudari se-ibu dari anak zina tersebut memperoleh bagian 1/6. Kemudian sisanya diserahkan ke *baitul mal*.
4. Apabila ibu anak zina mewarisi bersama-sama dengan dua orang atau lebih saudara-saudari anak zina se-ibu, maka ibunya memperoleh bagian 1/6. Sedangkan saudara-saudarinya yang se-ibu mendapatkan bagian 1/3 dan sisanya diserahkan ke *baitul mal*.
5. Jika dahulu ibunya adalah seorang hamba sahaya, maka sisa hartanya diperuntukkan bagi majikannya. Namun apabila ibunya seorang yang

⁸ Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 77-78.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet. ke-2, h. 148

merdeka dan sedang tidak berada dalam perwalian, maka sisanya diserahkan kepada *baitul mal*.¹⁰

Dasar pijakan pendapat Syafi'i ini adalah keumuman dari firman Allah SWT dalam surat an-Nisa, ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ فَإِن كُن نِسَاءً فَفَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفٌ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِدَةِ نِصْفُ مَا تَرَكَ فَإِن كَانَتْ أَخَوَاتٍ فَلِلْمُتَّحِدَةِ السُّدُوسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَارٌ أَبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat seperiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat sepereman. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa':11)¹¹

¹⁰ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, penerjemah: Muhammad Yasir Abdul Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, cet. ke-3, h. 183.

¹¹ Depag RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka al-Kutsar, 2009), h. 78.

Menurut pendapat Syafi'i, Allah telah menetapkan bagian bagi ibu, yaitu $\frac{1}{3}$, sebagaimana yang disebutkan di dalam al-Qur'an:

... فان لم يكن له ولد وورثه ابوه فلامه الثلث ...

“...jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...”.

Ayat ini menunjukkan secara *zahir* bahwa jika orang yang meninggal itu hanya diwarisi oleh ibu dan bapanya, maka ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$. Sementara itu menurutnya tidak ada *nash* yang *mentakhsis* keumuman pengertian ibu yang terdapat dalam ayat tersebut. Sehingga menurut Syafi'i tidak ada penambahan bagian bagi ibu anak zina melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.¹²

Pendapat yang dipegang oleh Syafi'i ini juga tidak membolehkan sisa harta warisan anak zina kembali diserahkan kepada *ashabul furud*. Karena Allah telah menentukan bagian yang menjadi hak bagi mereka secara jelas dan pasti di dalam al-Qur'an, sehingga tidak perlu ditambah-tambah sebagaimana yang terjadi jika menggunakan *radd* dalam menghabiskan sisa harta warisan.

Menurut pendapat ini juga, menambah bagian untuk mereka (*ashabul furud*) berarti membuat ketentuan yang melampaui batas ketentuan *syari'at*. Selain itu, sisa harta warisan yang telah dibagikan kepada *ashabul furud* adalah harta yang tidak dapat dimiliki oleh seorang

¹² Al-Mawardi, *Al-Hawiy al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Alamiyah, 1994), juz 8, cet. ke-1, h. 160

ahli waris karena tidak ada jalan untuk memilikinya. Karena itu, sisa harta warisan tersebut harus diserahkan ke kas perbendaharaan negara (*baitul mal*).¹³

Berikut beberapa contoh penyelesaian pembagian harta warisan anak zina menurut Syafi'i:

1. Seorang anak tak sah mati dengan meninggalkan harta sebanyak Rp. 150.000.000,-. Ahli warisnya terdiri dari: Ibu dan Ayah, maka:

Ahli waris	Fardh	dari asal masalah 3 sahamnya:	dari peninggalan Rp 150.000.000,- penerimaannya:
Ibu	1/3	$1/3 \times 3 = 1$	$1 \times \frac{\text{Rp. } 150.000.000,-}{3} =$ Rp. 50.000.000,-
Ayah	Bukan ayah sah bagi si mati		-
Sisa harta= Rp. 150.000.000,- - Rp. 50.000.000,- = Rp. 100.000.000,- diserahkan kepada <i>baitul mal</i>			

Ibu anak zina mendapatkan 1/3 dari harta warisan anak zinanya, yaitu Rp. 50.000.000,-. Sedangkan ayahnya tidak mendapatkan bagian karena tidak ada hubungan kewarisan antara keduanya. Sisa harta warisan sebesar Rp. 100.000.000,- diserahkan ke *baitul mal*.

2. Seorang anak zina mati meninggalkan harta sebanyak Rp. 100.000.000,-. Ahli warisnya terdiri dari ibu, ayah dan seorang saudara perempuan se-ibu, maka:

¹³ *Ibid.*

Ahli waris	Fardh	dari asal masalah 6 sahamnya:	dari peninggalan Rp 1.000.000.000,- penerimaannya:
Ibu	1/3	$1/3 \times 6 = 2$	$2 \times \frac{\text{Rp. } 1.000.000.000,-}{6} = \text{Rp. } 333.333.333,-$
Ayah	Bukan ayah sah bagi si mati		-
Saudara pr. Se-ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{\text{Rp. } 1.000.000.000,-}{6} = \text{Rp. } 166.666.667,-$
Jumlah = Rp. 333.333.333,- + Rp. 166.666.667,- = Rp. 500.000.000,-			
Sisa harta = Rp. 1.000.000.000,- - Rp. 500.000.000,- = Rp. 500.000.000,- diserahkan kepada <i>baitul mal</i>			

Ibu anak zina mendapatkan $1/3$ dari harta warisan anak zinanya, yaitu Rp. 333.333.333,-. Saudara perempuan se-ibu memperoleh Rp. 166.666.667,-, sedangkan ayahnya tidak mendapatkan bagian. Kemudian sisa harta warisan anak zina tersebut diserahkan ke *baitul mal*, sebesar Rp. 500.000.000,-

3. Seorang anak zina mati dengan meninggalkan harta sebanyak Rp. 50.000.000.000,-. Ahli warisnya terdiri dari ibu, ayah dan tiga orang saudara perempuan se-ibu, maka:

Ahli waris	Fardh	dari asal masalah 6 sahamnya:	dari peninggalan Rp 50.000.000.000,- penerimaannya:
Ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{\text{Rp. } 50.000.000.000,-}{6} = \text{Rp. } 8.333.333.333,-$
Ayah	Bukan ayah sah bagi si mati		-
3 orang Saudara pr. Se-ibu	1/3	$1/3 \times 6 = 2$	$2 \times \frac{\text{Rp. } 50.000.000.000,-}{6} = \text{Rp. } 16.666.666.667,-$
Jumlah = Rp. 8.333.333.333,- + Rp. 16.666.666.667,- = Rp. 25.000.000.000,-			
Sisa harta = Rp. 50.000.000.000,- - Rp. 25.000.000.000,- = Rp. 25.000.000.000,- diserahkan kepada <i>baitul mal</i>			

Ibu anak zina harta warisan anak zinanya, sebesar Rp. 8.333.333.333,-. Sedangkan 3 orang saudara perempuan se-ibu memperoleh Rp. 16.666.666.667,-. Ayahnya tidak mendapatkan bagian, dan sisa harta warisan anak zina sebesar Rp. 25.000.000.000,- tersebut diserahkan ke *baitul mal*.

2. Ahmad Bin Hambal

Pendapat yang dipegang oleh Ahmad bin Hambal dalam kewarisan anak zina, yaitu di samping ibu dari anak zina tersebut memperoleh bagian sebagaimana mestinya, juga disebutkan bahwa yang menjadi *ashabahnya* adalah *ashabah* dari ibunya anak zina¹⁴. Pendapat ini juga dipegang oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Ali, Umar dan Ibnu Mas'ud, dan juga oleh beberapa ulama dan mazhab, seperti al-Hasan, Ibnu Sirrin, dan ats-Tsauri.¹⁵

Dari Umar, dikatakan jika anak istri yang terkena *li'an* oleh suaminya tidak meninggalkan orang yang mendapatkan bagian, maka harta itu untuk *ashabahnya*. *Ashabahnya* adalah *ashabah* ibunya, bukan *ashabah* bapaknya. Sedangkan kewarisan anak zina sama dengan warisan anak dari wanita yang *dili'an*.¹⁶

¹⁴ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1994), jilid 6, cet. ke-1, h. 181.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah: Abu Usamah Fathur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, cet. ke-1, h. 712.

¹⁶ Muhammad Rawwas Qal'aliji, *Mansu'ah Fiqhi Umar Ibnul Kaththhab ra*, penerjemah: M. Abdul Mujieb, dkk, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke-1, h. 247.

Dalam pendapat yang dipegang oleh Ahmad bin Hambal, meskipun tidak ada ahli waris yang berasal dari golongan *ashabah* dalam pembagian harta warisan anak zina namun sisa harta yang seharusnya menjadi bagian bagi ahli waris dari golongan *ashabah* diberikan kembali (*diraddkan*) kepada ahli waris *ashabul furud*. Meskipun mereka sebelumnya telah mendapatkan bagian masing-masing.¹⁷

Ada beberapa hal yang dapat kita diketahui dari pendapat ini, yaitu:

1. Ahmad bin Hambal, sebagaimana ulama-ulama lainnya menyamakan anak *li'an* dengan anak zina dalam masalah pembagian harta warisan.¹⁸
2. Jika ibu anak zina mewarisi sendirian, maka seluruh harta untuk ibu anak zina tersebut.
3. Jika ibu anak zina mewarisi bersama-sama dengan seorang saudara atau saudari se-ibu, maka ibunya mendapat bagian 1/3, sedangkan saudara atau saudari se-ibu dari anak zina tersebut memperoleh bagian 1/6. Kemudian sisanya *diradd* (dikembalikan) kepada ibu dan saudara atau saudari anak zina sesuai dengan perbandingan bagian mereka masing-masing.
4. Apabila ibu anak zina mewarisi bersama-sama dengan dua orang atau lebih saudara-saudari anak zina se-ibu, maka ibunya memperoleh bagian 1/6. Sedangkan saudara-saudarinya yang se-ibu mendapatkan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 106.

¹⁸ *Ibid.*, h. 48.

bagian 1/3 dan sisanya dikembalikan kepada mereka sesuai dengan perbandingan bagian mereka.

5. Apabila ibu dari anak zina tidak ada, maka yang mewarisi harta warisannya adalah *ashabah* dari ibu anak zina, yaitu orang-orang yang berhak mewarisi sebagai *ashabah* jika ibunya meninggal. Seperti anak keturunan dari ibu anak zina atau saudara-saudari se-ibu anak zina, saudara laki-laki ibu anak zina, ayah ibu anak zina dan keluarga lainnya dari ibu anak zina.¹⁹

Berikut ini beberapa hadits yang dijadikan dasar pijakan dari pendapat ini, yaitu hadits:

يحيى بن قزعة :

رضي الله عنهما : ان رجل لاعن امراته في زمان

عليه وسلم و نتفى من ولدها صلى الله عليه وسلم

20

بينهما

Artinya: Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar ra, bahwasanya pada zaman Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang menuduh istrinya berbuat zina serta tidak mengakui anak dari istrinya, maka Nabi SAW memisahkan keduanya dan menisbahkan anak kepada perempuan (ibunya). (HR. Muttafaq 'Alaih)

Secara *zahir* hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menisbahkan anak yang tidak diakui oleh ayahnya kepada ibunya.

¹⁹ Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 340.

²⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Qahirah: Dar Ibnu al-Hisyam, 2004), cet. ke-1, h. 786.

Dengan begitu anak zina mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, begitu juga dengan hubungan kewarisan antara keduanya. Maksud hadits di atas sesuai dengan maksud hadits Nabi SAW, dari Amru bin Syu'aib:

حدثنا الوليد اخبرني عيسى ابو محمد
عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه و
رثتها من بعدها²¹

Artinya: Musa bin Amir meriwayatkan kepada kami, Walid meriwayatkan kepada kami, Isa Abu Muhammad menyampaikan kepadaku dari Ala' bin Harits, dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi SAW menjadikan warisan anak dari anak wanita yang di-li'an diperuntukkan bagi ibunya dan bagi ahli warisnya.

Hadits ini secara *zahir* menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadikan warisan anak wanita yang di-li'an diperuntukkan bagi ibunya dan ahli warisnya yang lain yaitu kerabat ibu anak zina. Kedua hadits di atas, merupakan dalil untuk menetapkan bahwa ibu anak zina berhak atas harta warisan anak zinanya, sedangkan ayahnya tidak. Ahmad bin Hambal, Ali, Umar dan Ibnu Mas'ud juga menggunakan hadits dari Watsilah bin Aqsa²²:

حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي

²¹ Abu Daud, *op. cit.*, h. 51.

²² Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, *loc. cit.*

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

ثلاثة مواريث : عتيقها و لقيطها و ولدها الذي لا عنت عليه²³

Artinya: Ibrahim bin Musa ar-Razi meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Harb meriwayatkan kepada kami, ‘Umar bin Rubah at-Taghlibi meriwayatkan kepadaku dari Abdul Wahid bin Abdullah an-Nashry, dari Wasilah bin Asqa’, dari Nabi SAW, berkata: Wanita menguasai tiga jenis harta, budak yang dimerdekakannya, anak yang dipungutnya dan anak yang *dili’an* oleh suaminya.

Hadits Nabi SAW tersebut memberikan indikasi bahwa harta warisan dari anak zina adalah milik ibunya²⁴ dan begitu juga dengan sisa dari harta warisan yang ditinggalkan oleh anak zinanya. Sehingga apabila ibu anak zina hanya mewarisi sendiri, maka ia berhak atas semua harta warisan yang ditinggalkan oleh anak zinanya itu.

Menurut pendapat Ahmad bin Hambal ini, menambahkan bagian bagi *ashabul furud* dengan sisa harta warisan bukan berarti membuat hukum tanpa *nash*, sehingga penambahan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang melampaui batas syari’at sebagaimana yang dikatakan oleh pendapat yang dipegang Syafi’i. Sehingga untuk ibu anak zina di samping ia berhak mendapatkan 1/3 bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh anak zinanya, ia juga berhak memperoleh sisa harta warisan tersebut jika memang tidak ada ahli waris lain dari golongan *ashabah*. Begitu juga dengan saudara-saudari se-ibu anak zina serta neneknya.

²³ Abu Daud, *loc. cit.*

²⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *op. cit.*, h. 347.

Berikut beberapa contoh penyelesaian pembagian harta warisan anak zina menurut Ahmad bin Hambal:

1. Seorang anak zina mati meninggalkan harta sebanyak Rp. 100.000.000.000,-. Ahli warisnya terdiri dari ibu dan seorang saudara perempuan se-ibu, maka:

Ahli waris	Fardh	dari asal masalah 6 sahamnya	dari peninggalan Rp 100.000.000.000,- penerimaannya
Ibu	1/3	$1/3 \times 6 = 2$	$2 \times \frac{\text{Rp. } 100.000.000.000,-}{3} =$ Rp. 66.666.666.667,-
Saudara pr. Se-ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{\text{Rp. } 100.000.000.000,-}{3} =$ Rp. 33.333.333.333,-
Jumlah = 3 (dijadikan asal masalah dalam <i>radd</i>)			

Ibu anak zina mendapatkan bagian 1/3, sedangkan saudara perempuan se-ibu mendapatkan bagian 1/6. Sehingga $1/3 + 1/6 = 1/2$ dan bersisa $1/2$ bagian harta warisan. Asal masalahnya adalah 3 sehingga ibu mendapatkan bagian 2/3, yaitu sebesar Rp. 66.666.666.667,-. Saudara perempuan se-ibu mendapatkan bagian 1/3 yaitu Rp. 33.333.333.333,-

2. Seorang anak tak sah mati dengan meninggalkan harta sebanyak Rp. 15.000.000.000,-. Ahli warisnya terdiri dari: Ibu dan Ayah, maka:

Ahli waris	Fardh	dari asal masalah 3 sahamnya	dari peninggalan Rp 15.000.000.000,- penerimaannya
Ibu	1/3	1/3 x 3 = 1	1 x <u>Rp. 15.000.000.000,-</u> = 1 Rp. 15.000.000.000,-
Ayah	Bukan ayah sah bagi si mati		-
Jumlah = 1 (dijadikan asal masalah dalam <i>radd</i>)			

Ibu anak zina memperoleh seluruh harta yang ditinggalkan oleh anak zinanya sebesar Rp. 15.000.000.000,- karena ia mewarisi sendirian dan sisa harta warisan tersebut *diraddkan* kepadanya.

3. Seorang anak zina mati dengan meinggalkan harta sebanyak Rp. 500.000.000.000,-. Ahli warisnya terdiri dari ibu, ayah, nenek dan tiga orang saudara perempuan se-ibu, maka:

Ahli waris	Fardh	dari asal masalah 6 sahamnya	dari peninggalan Rp 500.000.000.000,- penerimaannya
Ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{\text{Rp. } 500.000.000.000,-}{3}$ = Rp. 166.666.666.667,-
Ayah	Bukan ayah sah bagi si mati		-
Nenek	Terhijab oleh ibu		-
3 orang Saudara pr. Se-ibu	1/3	$1/3 \times 6 = 2$	$2 \times \frac{\text{Rp. } 500.000.000.000,-}{3}$ = Rp. 333.333.333.333,-
Jumlah = 3 (dijadikan asal masalah dalam <i>radd</i>)			

Ibu anak zina mendapatkan bagian 1/6, sedangkan ayah bukanlah ayah sah bagi anak zina. Saudara perempuan se-ibu mendapatkan bagian 1/3. Sehingga $1/6 + 1/3 = 1/2$ dan masih ada sisa $1/2$ bagian harta warisan. Jadi asal masalahnya dirubah menjadi 3 sehingga ibu mendapatkan bagian 1/3, yaitu Rp. 166.666.666.667,-. Sedangkan saudara perempuan se-ibu mendapatkan $2/3$ yaitu Rp. 333.333.333.333,-

B. Perbandingan Pendapat Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal Mengenai Pembagian Harta Warisan Anak Zina

1. Persamaan

Ada beberapa persamaan dari kedua pendapat yang dipegang oleh Syafi'i dan Ahmad bin Hambal dalam masalah kewarisan anak zina ini, yaitu:

a. Hubungan Nasab anak zina.

Seorang anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan ia lahir dan tidak pula kepada laki-laki yang menikahi ibunya setelah ia lahir. Ini adalah kesepakatan jumhur ulama.²⁵ Karena tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan dia lahir, maka seluruh hukum nasab antara keduanya pun tidak berlaku. Adapun hukum nasab tersebut yaitu:

1. Antara laki-laki pezina dan anak zinanya, keduanya tidak saling mewarisi.
2. Laki-laki tersebut tidak wajib memberi nafkah kepada anak zinanya.
3. Laki-laki tersebut bukan mahram bagi anak zinanya (jika dia wanita) kecuali apabila laki-laki itu menikah secara sah dengan ibu anak zinanya setelah mereka bertaubat dan setelah anak zina itu lahir, kemudian keduanya telah melakukan hubungan suami-

²⁵ Asyhari, Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris, al-Faraidl*, (Semarang: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), cet. ke-1, h. 215.

istri, dan setelah anak itu lahir, maka anak ini menjadi mahramnya.

4. Laki-laki tersebut tidak bisa menjadi wali anak itu dalam pernikahannya (jika dia wanita).

b. Hubungan kewarisan anak zina.

Dalam hal ini, hubungan tersebut ditentukan oleh ketetapan nasab anak zina yang mana ia dinasabkan kepada ibunya. Jumhur ulama sepakat bahwa anak zina hanya dinasabkan kepada wanita yang melahirkannya, sehingga ia hanya dapat waris dan mewarisi dengan ibunya saja.²⁶

Bila seorang anak zina berkedudukan sebagai ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia, maka jumhur ulama sepakat bahwa dia hanya mewarisi harta peninggalan dari ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Begitu juga jika ia berkedudukan sebagai pewaris, maka harta benda yang ditinggalkannya hanya dapat diwarisi oleh ibunya dan kerabat dari pihak ibunya.²⁷

c. Kewarisan anak zina dan anak *li'an*.

Syafi'i dan Ahmad bin Hambal sebagaimana para ulama lainnya, sepakat menyamakan anak *li'an* dengan anak zina dalam masalah pembagian harta warisan. Sehingga anak *li'an*, sebagaimana halnya anak zina hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibu

²⁶ Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 222.

²⁷ Alu Mubarak dan Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al-Authar*, penerjemah: Ari Hamzah, Fachrudin, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid 3, cet. ke-1, h. 354.

dan keluarga dari pihak ibunya saja. Ia adalah ahli waris ibunya dan ibunya adalah ahli waris anak *li'annya*.²⁸

- d. Bagian (*fardh*) yang menjadi hak ahli waris dari anak zina.

Hal lain yang menjadi persamaan antara pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal yaitu mengenai bagian yang menjadi hak ahli waris dari anak zina. Bagian-bagian yang dimaksudkan di sini adalah bagian yang sebelumnya telah ditentukan oleh Allah di dalam al-Qur'an, yaitu bagian untuk para ahli waris yang termasuk ke dalam kelompok *ashabul furud*. Dalam hal ini yang mana anak zina tersebut belum menikah, maka ahli warisnya adalah ibunya dan saudara-saudari se-ibunya. Kemudian neneknya apabila ibu anak zina sudah tidak ada²⁹.

Sebagaimana yang ditetapkan Allah di dalam al-Qur'an, apabila ibu anak zina mewarisi sendirian, maka ia berhak memperoleh bagian 1/3 dari harta warisan. Apabila ibu anak zina mewarisi bersama-sama dengan seorang saudara atau saudara se-ibu, maka ibunya berhak mendapat bagian 1/3, sedangkan saudara atau saudara se-ibu dari anak zina tersebut berhak memperoleh bagian 1/6.

Apabila ibu anak zina mewarisi bersama-sama dengan dua orang atau lebih saudara-saudari anak zina se-ibu, maka ibunya

²⁸ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 148.

²⁹ *Ibid.*, h. 275

berhak memperoleh bagian 1/6. Sedangkan saudara-saudarinya yang se-ibu berhak mendapatkan bagian 1/3.³⁰

2. Perbedaan

Perbedaan yang terdapat antara pendapat yang dipegang oleh Syafi'i dan Ahmad bin Hambal yaitu:

- a. Kedudukan umat Islam dan *baitul mal* dalam hubungan kewarisan anak zina.

Baitul mal artinya rumah harta atau kas negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan Islam untuk mengurus masalah keuangan negara.³¹

Menurut Syafi'iyah, umat Islam yang dalam masalah kewarisan ini diwakili oleh *baitul mal*, memperoleh warisan dari anak zina dengan jalan mewarisi melalui jalur *ashabah*. Karena umat Islam juga berkewajiban membayar *diyat* orang Islam yang melakukan tindak pembunuhan yang tidak mampu membayar *diyat* kepada keluarga korban serta tidak mempunyai keluarga sama sekali. Hal ini sama dengan kewajiban *ashabah* yang membayar *diyat* anggota keluarganya yang berada dalam keadaan yang sama.³²

Sedangkan menurut Hanabilah, *baitul mal* mendapat harta peninggalan yang tidak ada pewarisnya tidak dengan jalan mewarisi,

³⁰ Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 232, 323.

³¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam I*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), cet. ke-9, h. 223.

³² Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 77.

tetapi hanya sebagai sebuah lembaga tempat menyimpan dan menyalurkannya untuk kemaslahatan umat Islam³³. Dalam masalah pembagian harta warisan anak zina ini, selama ia masih mempunyai ahli waris, maka hartanya tetap dibagikan kepada ahli waris yang ada, begitu juga dengan sisanya.

Menurut Syafi'i, *baitul mal* itu adalah perwakilan umat Islam dalam mewarisi sisa harta, sedangkan menurut Ahmad bin Hambal *baitul mal* hanya sebagai sebuah lembaga keuangan dan bukan lembaga yang berhak menerima harta warisan atas nama umat Islam. Sehingga Ahmad bin Hambal tidak memasukkan hubungan Islam ke dalam salah satu sebab-sebab mewarisi, sedangkan Syafi'i memasukkan hubungan sesama Islam sebagai salah satu sebab yang dapat menyebabkan mewarisi.

b. Sisa harta warisan anak zina.

Apabila tidak ada ahli waris dari golongan *ashabah*, sementara harta warisan anak zina telah dibagikan kepada ahli waris *ashabul furud* dan harta tersebut masih bersisa, maka akan timbul persoalan mengenai sisa harta warisan anak zina. Akan diberikan kepada siapa harta tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa ahli waris yang berhak menerima sisa harta warisan yaitu ahli waris yang termasuk ke dalam kelompok *ashabah*, yang sebagian besarnya adalah anggota keluarga

³³ *Ibid.*

dari pihak ayah. Dalam masalah ini, seorang anak zina tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan ia lahir dan secara otomatis seluruh hukum nasab antara anak zina dan laki-laki tersebut tidak berlaku, termasuk hubungan kewarisan antara keduanya. Artinya, anak zina tersebut tidak mempunyai anggota keluarga dari pihak ayah yang kebanyakan dari mereka adalah ahli waris yang termasuk ke dalam golongan *ashabah*.³⁴

Dalam pembagian harta warisan anak zina ini apabila terjadi kelebihan atau sisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada *ashabul furud* yang ada, maka menurut Syafi'i yang menerima sisa harta warisan anak zina adalah umat muslim melalui *baitul mal*. Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal, sisa hartanya diberikan kepada ahli waris yang ada sesuai dengan perbandingan bagian mereka. Kemudian jika ibu anak zina tidak ada, maka sisa tersebut dibagikan kepada *ashabah* anak zina itu, yaitu *ashabah* ibu anak zina.³⁵

c. Penggunaan *radd*.

Radd menurut bahasa artinya memalingkan dan mengembalikan. Sedangkan menurut istilah, yaitu memalingkan atau menyerahkan sisa harta warisan dari bagian-bagian yang tertentu (*furud*) kepada para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu

³⁴ *Ibid.*, h. 117.

³⁵ Ibnu Rusyd, *loc. cit.*

(*ashabul furud*) ketika tidak ada *ashabah*³⁶. *Radd* juga berarti penambahan pada bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris³⁷.

Syafi'i tidak menggunakan *radd* dalam pembagian harta warisan anak zina dan menyerahkan sisa harta warisan ke *baitul mal*. Menurutny, penggunaan *radd* itu berarti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, karena dalam penggunaan *radd* itu terjadi penambahan bagian harta warisan kepada *ashabul furud*. Sedangkan Ahmad bin Hambal menggunakannya (*radd*) dalam menyelesaikan masalah harta warisan yang bersisa.

- d. Penambahan bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris anak zina

Menurut pendapat yang dipegang oleh Syafi'i, tidak boleh menyerahkan sisa harta warisan anak zina kepada *ashabul furud*. Karena menurut pendapat ini, Allah telah menentukan bagian yang menjadi hak bagi mereka secara jelas dan pasti di dalam al-Qur'an. Sehingga tidak perlu ditambah-tambah sebagaimana yang terjadi jika menggunakan *radd* dalam menghabiskan sisa harta warisan.

Menurut pendapat yang dipegang oleh Syafi'i, menambah bagian untuk mereka (*ashabul furud*) berarti membuat ketentuan yang melampaui batas ketentuan *syari'at*. Selain itu, sisa harta warisan yang telah dibagikan kepada *ashabul furud* adalah harta yang tidak

³⁶ Saleh al-Fuazan, *Al-Mulakhhasul Fiqhi*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema insani Press, 2005), cet. ke-1, h. 623

³⁷ Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 423.

dapat dimiliki oleh seorang ahli waris karena tidak ada jalan untuk memilikinya. Karena itu, sisa harta warisan tersebut harus diserahkan ke kas perbendaharaan negara (*baitul mal*).

Sedangkan menurut pendapat yang dipegang oleh Ahmad bin Hambal, menambahkan bagian bagi *ashabul furud* dengan sisa harta warisan bukan berarti membuat hukum tanpa *nash*, sehingga penambahan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang melampaui batas syari'at sebagaimana yang dikatakan oleh pendapat yang dipegang Syafi'i. Jadi, untuk ibu anak zina di samping ia berhak mendapatkan 1/3 bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh anak zinanya, ia juga bisa memperoleh sisa harta warisan tersebut jika memang tidak ada ahli waris lain dari golongan *ashabah*. begitu juga dengan saudara-saudari se-ibu anak zina serta neneknya.³⁸

C. Analisis

Keempat hal yang menjadi perbedaan antara pendapat yang dipegang oleh Syafi'i dan Ahmad bin Hambal semuanya saling berkaitan, dari permasalahan sisa harta warisan anak zina, berkaitan dengan kedudukan umat muslim dalam hal kewarisan dan juga berkaitan dengan penggunaan *radd*. Sedangkan *radd* berhubungan dengan penambahan bagian bagi ahli waris *ashabul furud*.

Baitul mal adalah sebuah lembaga keuangan negara. Meskipun di dalam al-Qur'an tidak disebutkan kedudukannya dalam masalah kewarisan, namun

³⁸ *Ibid*, h. 425-429.

mayoritas ulama menggunakan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Sholih bin Yahya sebagai dasar hukum *baitul mal*³⁹.

حدثني عبد السلام بن عتيق الدمشقي :
 إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر :
 يحيى بن المقدم عن أبيه :
 الله عليه وسلم يقول : انا وارث من لا وارث له أفك عنه
 ه (روه أبو داود وغيره)⁴⁰

Artinya: 'Abdussalam bin 'Atiq ad-Damsyiq meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Mubarak meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ismail bin 'Ayyas meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Hujr, dari Sholih bin Yahya bin Miqdam, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Aku mendengar rasulullah SAW berkata: Aku adalah pewarisnya orang yang tidak mempunyai pewaris, akulah yang akan membebaskan tawanannya (membayar diyat) dan mewarisi hartanya. (HR. Abu Daud dan lainnya)

Syafi'i menggunakan hadits tersebut diatas sebagai dalil untuk memasukkan hubungan Islam ke dalam sebab-sebab mewarisi. Mengenai hal ini, ada dua pendapat dikalangan ulama fiqh maupun ulama tafsir. Amir Syarifuddin yang mengutip dari Jaluddin al-Mahalliy⁴¹ memasukkan hubungan Islam ke dalam sebab-sebab mewarisi, begitu juga yang ditulis oleh Sulaiman Rasjid di dalam bukunya *Fiqh Islam*⁴² dan Moh. Anwar dalam

³⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 1*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), cet. ke-9, h. 188.

⁴⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), juz 3, cet. ke-1, h. 49.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 174.

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), cet. ke-39, h.

bukunya *al-Faraidl*⁴³. Sedangkan Saleh al-Fauzan hanya menyebutkan tiga sebab-sebab memperoleh warisan, yaitu tali kekerabatan melalui nasab, pernikahan dan *wala*⁴⁴, begitu juga dengan Muhammad Jawad Mughniyah⁴⁵, Hasbi ash-Shiddieqy⁴⁶ dan Ali Parman yang mengutip dari tafsir milik Al-Maraghi dan Rasyid Ridha⁴⁷.

Menurut penulis, hal ini juga yang menyebabkan Syafi'i berpendapat bahwa umat Islam dapat mewarisi harta warisan anak zina yang bersisa dengan diwakili oleh *baitul mal*. Menurut penulis, hadits di atas seharusnya dipahami sebagai sebuah isyarat bahwa *baitul mal* mempunyai kewenangan untuk mengambil harta warisan orang yang tidak memiliki ahli waris. Sehingga hubungan Islam yang dapat menjadi sebab *baitul mal* mengambil harta warisan orang yang meninggal tersebut adalah karena ia sama sekali tidak memiliki ahli waris. Karena di dalam hadits itu disebutkan "Aku adalah pewarisnya orang yang tidak mempunyai pewaris".

Kata-kata "orang yang tidak mempunyai pewaris" berarti orang yang meninggal yang sama sekali tidak memiliki keluarga yang berhak mewarisi karena hubungan nasab, baik melalui jalur ke atas (ibu, ayah, kakek, nenek

⁴³ Moh Anwar, *Faraidl: Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-msalahnya*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), cet. ke-1, h. 21.

⁴⁴ Saleh al-Fuazan, *op. cit.*, h. 564-566

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, penerjemah: Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Lentera, 2005), cet. ke-3, h. 541.

⁴⁶ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Bandung: Bulan Bintang, 1973), cet. ke-1, h. 42-44

⁴⁷ Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cet. ke-1, h. 174.

dan seterusnya), jalur ke bawah (anak, cucu dan terus ke bawah) maupun jalur ke samping (saudara dan saudari), maupun karena hubungan perkawinan (suami atau isteri) atau karena hubungan *wala'* (tuan yang memerdekakan). Sedangkan dalam masalah kewarisan anak zina yang diteliti disini, ia (anak zina tersebut) masih mempunyai ibu dan saudara-saudari sekandung yang mewarisinya melalui jalur *ashabul furud*. Sehingga sisa harta warisan anak zina yang masih mempunyai ahli waris *ashabul furud* tersebut tidak dapat diambil oleh *baitul mal*.

Selain itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam Ensiklopedi Islam bahwa sumber harta yang masuk ke dalam kas *baitul mal* yaitu:⁴⁸

1. Satu perlima dari *ganimah* dan pajak hasil-hasil tambang serta barang temuan,
2. Harta yang tidak ada pemiliknya, seperti kekayaan budak yang lari, dan harta yang ditemukan dari perampok yang ditangkap,
3. Harta dari orang yang murtad,
4. Tanah milik atau perkebunan yang mati pemiliknya dan tidak ada orang yang akan mewarisinya.

Dari beberapa sumber harta yang masuk ke dalam kas *baitul mal* di atas, sisa harta anak zina yang tidak memiliki ahli waris *ashabah* (masih memiliki ahli waris seperti ibu dan atau saudara-saudari se-ibu) tidak termasuk ke dalam sumber harta yang masuk ke dalam kas *baitul mal*. Karena yang disebutkan di atas adalah “tanah milik atau perkebunan yang mati

⁴⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op. cit.*, h. 224.

pemilikinya dan tidak ada orang yang akan mewarisinya”, artinya jika masih ada orang yang mewarisi (pewaris) harta peninggalan seseorang, maka harta tersebut tidak dapat diserahkan ke *baitul mal*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sisa harta warisan anak zina tidak harus diserahkan ke *baitul mal*, karena dalam masalah ini ia masih mempunyai ahli waris, dan sisa harta warisan yang ditinggalkan oleh anak zina tersebut dapat dibagikan kembali kepada ahli waris *ashabul furud* yang ada dengan menggunakan cara *radd*.

Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW tidak berbicara langsung mengenai masalah *radd*. Meskipun begitu, bagi Ahmad bin Hambal yang menggunakan *radd* dalam menyelesaikan masalah kewarisan anak zina ini memakai surat al-Anfal ayat 75 sebagai dalil⁴⁹. Di dalam ayat tersebut, disebutkan:

الذين امنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم فأوليك منكم^{٥٠} و أولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله^{٥١} ان الله بكل شيء عليم

Artinya: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁰

Telah kita ketahui bersama bahwa Syafi'i tidak menggunakan *radd* dalam pembagian harta warisan yang bersisa karena menganggap penggunaan *radd* dalam kewarisan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan

⁴⁹ Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 428.

⁵⁰ Depag RI, *op. cit.*, h. 186.

syari'at, namun fuqaha *mutaakhhirin* dari Syafi'iyah menggunakannya sebagaimana juga Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, fuqaha *mutaakhhirin* Malikiyah, Syi'ah Zaidiyah dan Imamiyah.⁵¹

Dengan digunakannya cara *radd* dalam pembagian harta warisan yang bersisa, maka akan berpengaruh pada bagian yang diterima oleh ahli waris anak zina. Sehingga meskipun Syafi'i dan Ahmad bin Hambal bertentangan dalam masalah pembagian harta warisan anak zina yang tidak memiliki *ashabah* ini, namun para fuqaha *mutaakhhirin* mereka sependapat mengenai penggunaan *radd*. Dengan digunakannya *radd*, maka bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris *ashabul furud* anak zina dapat bertambah, penambahan bagian ini adalah konsekuensi dari penggunaan *radd* itu sendiri.

Dengan demikian, meskipun Syafi'i tidak membolehkan adanya penambahan bagian harta warisan bagi ahli waris, namun para fuqaha *mutaakhhirin* dari Syafi'iyah melakukan hal tersebut (membolehkan penambahan bagian bagi ahli waris) sebagaimana Ahmad bin Hambal dan para ulama lainnya.

Menurut pendapat yang dipegang oleh Syafi'i, sisa harta anak zina yang belum menikah dan tidak memiliki *ashabah* diserahkan ke *baitul mal*, sedangkan menurut pendapat yang dipegang oleh Ahmad bin Hambal sisa harta tersebut diberikan kepada ahli waris yang ada, yaitu *ashabul furud* dengan menggunakan *radd*. Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW tidak membahas secara khusus mengenai masalah sisa harta warisan anak zina

⁵¹ Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 426. Lihat Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husain, *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, Penerjemah: Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, 2007), jilid 2, cet. ke-7, h. 44-45.

yang tidak mempunyai ahli waris *ashabah* ini. Hanya beberapa hadits Nabi yang berbicara secara umum mengenai masalah kewarisan anak zina, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'd:

الملاعنين الذى يرويه
:
و كان ابنها ينسب الى امه فجرت السنة انه
يرثها و ترث منه ما فرض الله لها (رواه البخارى ومسلم)⁵²

Artinya: Dalam hadits suami istri yang bermula'annah yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'd itu, sahal berkata : Bahwa perempuan tersebut sedang hamil, sedang anak dibangsakan kepada ibunya. Maka menurut sunnah (cara) yang berlaku, bahwa anak tersebut menjadi ahli waris dari ibunya dan ibunya menjadi ahli waris dari anaknya menurut apa yang telah ditetapkan Allah. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam beristimbath, Syafi'i dan Ahmad sama-sama menggunakan al-Qur'an dan sunnah. Meskipun kedua-duanya menggunakan sumber yang sama, yaitu al-Qur'an dan sunnah namun mereka memiliki pendapat tersendiri dalam menggunakan kedua sumber hukum tersebut. Perbedaan pendapat ini salah satunya terjadi karena perbedaan dalam memahami al-Qur'an, penerimaan dan penilaian periwayatan hadits. Sehingga meskipun Syafi'i dan Ahmad bin Hambal sama-sama mengetahui surat an-Nisa' ayat 11 dan al-Anfal ayat 75, namun pemahaman mereka terhadap kedua ayat tersebut yang membuat keduanya berbeda pendapat dalam masalah yang sama.

⁵² Al-Bukhari, *op. cit.*, h. 641. Redaksi lihat Alu Mubarak dan Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *loc. cit.*

Begitu juga dalam penerimaan dan penilaian hadits. Setiap ulama berbeda-beda dalam menerima dan menilai hadits. Selain tergantung pada usaha ia mencari dan menemukan hadits-hadits Nabi SAW dari para perawi, juga tergantung pada mampu atau tidaknya sebuah hadits memenuhi syarat *sanad* dan *matan* yang mereka tentukan agar dapat diterima sebagai sebuah hadits *shahih*. Bisa saja seorang ulama misalnya, tidak menemukan hadits-hadits yang oleh sebagian lama lainnya dijadikan dalil dalam menyelesaikan masalah yang sama. Atau ia menemukan hadits-hadits Nabi SAW itu, tetapi ia tidak menilai bahwa sebuah hadits itu *shahih*, sedangkan sebagian yang lain menilainya *shahih* dan menjadikannya sebagai dalil.⁵³

Dari sini, dapat dilihat ada kemungkinan Syafi'i belum menemukan hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh pendapat yang dipegang Ahmad bin Hambal, atau sudah menemukannya tetapi tidak menggunakannya sebagai dalil karena menurutnya hadits-hadits tersebut tidak kuat untuk dapat dijadikan sebagai dalil.

Di samping penerimaan dan penilaian periwayatan hadits, hal lain yang menjadi sebab perbedaan pendapat antara Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menurut analisa penulis adalah penerimaan pendapat sahabat. Dalam metode istimbath hukumnya, baik Syafi'i maupun Ahmad bin Hambal sama-sama menggunakan pendapat sahabat.⁵⁴ Dalam pembagian harta warisan anak zina ini, Syafi'i menggunakan pendapat sebagaimana yang digunakan oleh Zaid

⁵³ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 56.

⁵⁴ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. ke-1, h. 270-275.

bin Tsabit. Seperti yang disebutkan sebelumnya Zaid bin Tsabit adalah salah seorang sahabat yang menghafal dan mengumpulkan al-Qur'an, dan ia adalah seorang sahabat yang terkenal paling faham dalam masalah kewarisan.⁵⁵

Sedangkan Ahmad bin Hambal menggunakan pendapat yang juga digunakan oleh para sahabat seperti Ali, Umar dan Ibnu Mas'ud⁵⁶. Karena dalam beristimbath, apabila Ahmad menemukan dua pendapat dari para sahabat yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka ia akan mendahulukan pendapat yang berasal dari para Khulafa Rasyidin.⁵⁷

Dari kedua pendapat yang dipegang oleh Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, menurut penulis pendapat yang sebaiknya kita gunakan dalam pembagian harta warisan anak zina yang belum menikah dan tidak memiliki ahli waris dari golongan *ashabah* adalah pendapat yang dipegang oleh Ahmad bin Hambal. Menurut penulis, hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Watsilah bin Aqsa', dapat dijadikan dasar untuk memberikan sisa harta warisan anak zina yang tidak memiliki ahli waris *ashabah* kepada ibunya dan *ashabul furud* yang ada.

Dari hadits tersebut kita ketahui bahwa Nabi SAW memutuskan, anak yang *dili'an* (anak zina) mewarisi harta ibunya dan ibunya mewarisi harta anak *li'annya*⁵⁸, dan wanita (ibu) menguasai tiga jenis harta yang salah satunya adalah harta anak yang *dili'an*. Sementara menurut jumhur ulama,

⁵⁵ Malik bin Anas, *op. cit.*, h. 614.

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 711-712.

⁵⁷ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, h. 289.

⁵⁸ Ahmad bin Hambal, *loc. cit.*

pembagian harta warisan anak *li'an* sama dengan anak zina. Dari sini dapat kita ketahui bahwa wanita (ibu anak zina) lebih berhak atas harta anak zinanya dari pada kaum muslimin secara umum.

Meskipun hadits yang diriwayatkan dari Watsilah bin Aqsa' ini dikatakan sanadnya *dha'if*, namun hal inilah yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Bukan hanya Ali dan Umar saja yang menggunakannya, tetapi juga oleh Utsman dan Ibnu Abbas. Ada kemungkinan Zaid bin Tsabit dan Syafi'i serta ulama Madinah belum mendapatkan hadits tersebut sehingga mereka mengamalkan apa yang disebutkan di dalam surat an-Nisa' ayat 11 itu secara umum. Mereka tidak mengetahui bahwa ada hadits lain yang telah *mentaksis* keumuman ayat tersebut.⁵⁹

Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud mengatakan "Ibu adalah *ashabah* bagi yang tidak memiliki *ashabah*"⁶⁰. Selain itu, Ibnu Rusyd mengatakan:

Hadits-hadits ini seharusnya wajib untuk diambil, karena ia mengkhususkan keumuman dari firman Allah SWT, sedangkan jumhur ulama menganut prinsip bahwa sunnah dapat mengkhususkan al-Qur'an, boleh jadi hadits-hadits ini tidak sampai pada mereka yang memegang pendapat pertama, atau menurut mereka hadits-hadits ini tidak shahih. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Utsman, pendapat ini masyhur dikalangan generasi pertama shahabat, popularitasnya dikalangan sahabat sebagai bukti keshahihan hadits-hadits di atas, karena masalah ini tidak dapat diputuskan menurut *qiyas*.⁶¹

Selain beberapa pendapat ulama tersebut, alasan lain yang memperkuat penulis untuk memilih pendapat yang dipegang oleh Ahmad bin Hambal adalah pemahaman dari surat al-Anfal, ayat 75:

⁵⁹ Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 225.

⁶⁰ Abu Daud, *loc. cit.*

⁶¹ Ibnu Rusyd, *op cit.*, h. 713.

الذين امنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم فأوليك منكم و اولوا الارحام

بعضهم اولى ببعض فى كتب الله ان الله بكل شيء عليم

Artinya: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁶²

Kata “ ” di sini maksudnya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat atau hubungan kekeluargaan. Ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam megutamakan keluarga dari pada masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia, dimana seseorang akan lebih dekat kepada keluarganya dibanding dengan orang-orang yang bukan keluarganya. Pengutamaan keluarga ini sah selama tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan rasa tanggung jawab dan kesetiakawanan untuk eksistensi agama Islam⁶³.

Dalam hal kewarisan, hubungan antara anak zina dengan kaum muslimin lebih lemah dibandingkan dengan hubungan anak zina dengan kaum kerabatnya. Dimana antara anak zina dengan kaum muslimin hanya memiliki hubungan antar sesama muslim. Sedangkan hubungan antara anak zina dengan kaum kerabatnya ada dua, yaitu di samping hubungan antar sesama muslim juga ada hubungan nasab yang merupakan salah satu hubungan yang dapat menyebabkan mewarisi. Jadi adalah lebih pantas dan

⁶² Depag RI, *loc. cit.*

⁶³ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, penerjemah: As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), jilid 10, cet. ke-1, h. 91.

wajar jika sisa harta warisan anak zina yang belum menikah dan tidak mempunyai ahli waris dari golongan *ashabah* itu diserahkan (*diraddkan*) kepada ahli waris yang ada (*ashabul furud*), tidak kepada kaum muslimin melalui *baitul mal*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari bab-bab yang telah di uraikan di atas, penulis mengambil beberapa kesimpulan yang kiranya dapat kita fahami bersama:

1. Pembagian harta warisan anak zina menurut Syafi'i yaitu: ibunya mendapat warisan sebagaimana terdapat dalam Kitabullah. Saudara seibunya juga mendapatkan hak mereka. Apabila ibunya itu bekas budak, maka sisa warisannya untuk tuan ibunya. Apabila ibunya itu wanita merdeka atau tidak mempunyai perwalian, maka sisa warisan itu bagi kaum muslimin. Sedangkan menurut Ahmad Bin Hambal, pembagian harta warisan anak zina yaitu ibu dari anak zina tersebut memperoleh bagian sebagaimana mestinya, begitu juga dengan saudara-saidari se-ibu anak zina. Kemudian sisanya dikembalikan (*diraddkan*) kepada ahli waris *ashabul furud* anak zina. Namun jika ibu anak zina tidak ada, maka yang menjadi *ashabah*nya adalah *ashabah* dari ibunya apabila ibu anak zina tidak ada.
2. Persamaan antara pendapat Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal mengenai pembagian harta warisan anak zina, yaitu terletak pada hubungan nasab dan hubungan kewarisan anak zina, yang mana dalam hal ini anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan kewarisan dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Mengenai persamaan antara

kewarisan anak zina dan anak *li'an*, serta bagian yang menjadi hak bagi masing-masing ahli waris *ashabul furud*. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai kedudukan umat Islam dan *baitul mal* dalam kewarisan yang erat kaitannya dengan sebab-sebab mewarisi, sisa harta warisan anak zina yang tidak mempunyai *ashabah*, penggunaan *radd* dan bagian yang diterima oleh ahli waris (penambahan bagian bagi *ashabul furud*).

3. Dari kedua pendapat yang dipegang oleh Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menurut penulis, pendapat yang seharusnya kita gunakan dalam pembagian harta warisan anak zina yang belum menikah dan tidak memiliki ahli waris *ashabah* adalah pendapat yang dipegang oleh Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa sisa harta anak zina tersebut dibagikan kepada ahli waris yang ada (*ashabul furud*), tidak diserahkan kepada *baitul mal*. Karena hubungan antara anak zina dengan kaum muslimin lebih lemah dibandingkan dengan hubungan anak zina dengan kaum kerabatnya. Dimana antara anak zina dengan kaum muslimin hanya memiliki hubungan sesama muslim saja. Sedangkan hubungan antara anak zina dengan kaum kerabatnya ada dua, yaitu di samping hubungan sesama islam juga ada hubungan nasab yang termasuk ke dalam salah satu sebab mewarisi. Jadi adalah lebih pantas dan wajar jika sisa harta warisan anak zina yang belum menikah dan tidak mempunyai ahli waris dari golongan *ashabah* itu diserahkan kepada keluarganya, tidak kepada *baitul mal*.

B. Saran-saran

Sebagai penulis, kami memberikan beberapa saran berikut jika seandainya terjadi masalah seperti yang dibahas oleh penulis di atas, baik di dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah lingkungan masyarakat:

1. Sebagai umat islam sudah seharusnya kita melaksanakan syari'at Islam di dalam setiap sisi kehidupan kita. Sehingga tidak terjadi hubungan yang tidak sah yang dapat menyebabkan lahirnya anak zina. Begitu juga dalam melaksanakan pembagian harta warisan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam al-Qur'an.
2. Bagi laki-laki dan perempuan yang telah terlanjur melakukan perbuatan zina dan melahirkan seorang anak zina, sudah seharusnya bertaubat kepada Allah dan melangsungkan pernikahan yang sah serta melaksanakan kewajiban mereka untuk memelihara anak zina tersebut. Meskipun anak itu hanya dinasabkan kepada ibunya.
3. Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus bisa menjadi tempat bertanya dan contoh bagi masyarakat, terutama sekali mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang seharusnya mampu menguasai masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam sehingga tidak terjadi silang pendapat di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Alu Mubarak dan Syaikh Faisal bin. *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al-Authar*. Jilid 3. Cet. ke-1. Penerjemah: Ari Hamzah. Fachrudin. Asep Saefullah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Al-Albani, M. Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih Imam al-Bukhari*. Cet. ke-1. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press. 2008.
- _____. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jilid 2. Cet. ke- 2. Penerjemah: Abdul Mufid Ihsan. M. Sobar Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Cet. ke-1. Qahirah: Dar Ibnu al-Hisyam. 2004.
- Al-Fuazan, Saleh. *Al-Mulakhhasul Fiqhi*. Cet. ke-1. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema insani Press. 2005.
- Al-Husain, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghayatil Ikhtishar*. Jilid 2, Cet. ke-7. Penerjemah: Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa. Surabaya: Bina Iman, 2007.
- Al-Mawardi. *Al-Hawiy al-Kabir*. Juz 8. Cet. ke-1. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Alamiyah. 1994.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Khamsah*. Cet. ke-7. Penerjemah: Masykur. A.B. dkk. Jakarta: Lantera. 2001.
- Anas, Imam Malik bin. *Al-Muwaththa’*. Cet. ke-1. Beirut: Dar al-Fikr. 1989.
- _____. *Al-Muwaththa’ lil Imam Malik*. Cet. ke-1. Penerjemah: Muhammad Iqbal Qadir. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Anwar, Moh. *Faraidl: Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya*. Cet. ke-1. Surabaya: Al-Ikhlash. 1981.
- Ash-Shiddieqi, T. Muhammad Hasbi. *Fiqhul Mawarits*. Cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang. 1973.
- _____. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. ke- 6. Jakarta: Bulan Bintang. 1980.
- _____. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*. Cet. ke-1 Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.

Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Bin Idris. *al-Umm*. Juz 4. Cet. ke-2. Beirut: Dar al-Fikr. 1983.

_____. *Mukhtashar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*. Jilid 2. Cet. ke-3. Penerjemah: Muhammad Yasir Abdul Muthalib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Asy-Syurbasi, Ahmad. *al-Aimmat al-Arba'ah*. Penerjemah: Sabil Huda dan Ahmadi. Jakarta: Bumi Aksara. 1993.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*. Cet. ke-1. Penerjemah: Abdul Ghoffar EM. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2001.

Baiquni, N. A, dkk. *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*. Surabaya: Indah. 1996.

Bik, Hudhari. *Tarikh at-Tasyri' al-Islam*. Cet. ke-1. Penerjemah: Mohammad Zuhri. Semarang: Darul Ikhya. 1980.

_____. *Ushul Fiqih*. Penerjemah: Zaid. H. Alhamid. Pekalongan: Raja Murah. Th.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid V. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. 1977.

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Juz 3. Cet. ke-1. Beirut: Dar Al-Fikr. 1994.

Depag RI. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka al-Kutsar. 2009.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam 5*. Cet. ke-5. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. 2001.

_____. *Ensiklopedi Islam 1*. Cet. ke-9. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. 2001.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam 1*. Cet. ke-6. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. 2003.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Nasional Indonesia. Cet. ke-1. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Delta Pamungkas. 1997.

Doi, Abdurrahman I. *Syari'ah The Islamic Law*. Cet. ke-1. Penerjemah: Basri Iba Asghari dan Wadi Masturi. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Ensiklopedi Ijma'. Cet. ke-1. Penerjemah; K.H.A. Sahal Machfudz dan K.H. Musthafa Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1987.

Ensiklopedi Islam (Ringkas) Cyril Glasse. Cet, ke-3. Penerjemah: Ghuftron A. Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Farid, Syaikh Ahmad. *Min A'alam as-Salaf*. Cet. ke-2. Penerjemah: Masturi Irham, Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2007.

Ghazali, Muhammad Bahri, Djumadris. *Perbandingan Mazhab*. Cet. ke-1. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1992.

Hambal, Ahmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*. Juz 2. Cet. ke-1. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah. 1993.

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *al-Mughni*. Jilid 6. Cet. ke-1. Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah. 1994.

Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. ke-3. Bandung: Remaja Rosdakara. 2003.

_____. *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*. Cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Penerjemah: Noer Iskandar al-Basany, Moh. Tolchah Mansoer. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.

Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Karya Anda. Th.

Kuzari, Ahmad. *Sistem Asabah; Dasar Pemikiran Hak Milik Atas Harta Peninggalan*. Cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

Parman, Ali. *Kewarisan Dalam al-Qur'an*. Cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

Qal'aliji, Muhammad Rawwas. *Mansu'ah Fiqhi Umar Ibnul Kaththhab ra*. Cet. ke-1. Penerjemah: M. Abdul Mujieb, dkk. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.

Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil Qur'an*. Jilid 10. Cet. ke-1. Penerjemah: As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.

Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawarits*. Cet. ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.

Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*. Cet. ke-3. Bandung: al-Ma'arif. 1994.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. cet. ke-39. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2006.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 2. Cet. ke-1. Penerjemah: Abu Usamah Fathur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-A'immah*. Jilid 2 . Cet. ke-1. Penerjemah: Khairul Amru Harahap. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Syakur, Asyhari, Djunaidi Abd. *Ilmu Waris, al-Faraidl*. Cet. ke-1. Semarang: Pustaka Hikmah Perdana. 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. ke-2. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12, Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 1, Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tentang Hak Azasi Manusia*. Cet. ke-1. Bandung: Fermana, 2007.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Cet. ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad '. *Al-Jami' fii Fiqhi an-Nisaa'*. Cet. ke- 25. Penerjemah: M. Abdul Ghoftar. Jakarta: Pustaka al- Kautsar. 2007.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Cet. ke-1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Cet. ke-6. Penerjemah: Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2000.